

**PENGARUH PENGANGGURAN, KETIMPANGAN
PENDAPATAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI BALI
TAHUN 2010-2023**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
Dwi Oktavia
Nim: 214105020008

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2024**

**PENGARUH PENGANGGURAN, KETIMPANGAN
PENDAPATAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
(IPM) TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI BALI
TAHUN 2010-2023**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

Dwi Oktavia
Nim: 214105020008



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'NADIA', is placed below the university name.

NADIA AZALIA PUTRI, M.M
NIP. 199403042019032019

**PENGARUH PENGANGGURAN, KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI
BALI TAHUN 2010-2023**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu

persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Selasa

Tanggal: 10 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP.196812261996031001

Sekretaris

Mohammad Mirza Pratama, S.ST., M.M
NIP.199112052023211022

Anggota ;

1. Dr. Hj. Khairunnisa Musari, S.T., M.MT ()
2. Nadia Azalia Putri, M.M ()

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ubaidillah, M.Ag
NIP.196812261996031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya : “ Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Ar-Ra’du 13:11)¹

“Menjadi Hebat Saja Tidak Cukup Jadilah Hebat Yang Bermanfaat”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Republik Indonesia, *Al-Qu'an dan Terjemahan*, (Semarang:Toha Putra, 1989), 11.

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. Yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada hamba-Nya untuk menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan yaitu penulisan skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah orisinal karya mahasiswa dalam menyelesaikan dunia perkuliahan. Skripsi ini menjadi salah satu saksi saya selama menjalankan perkuliahan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini ditujukan kepada beberapa orang yang sudah menjadi motivasi, dorongan serta *support system* terbaik Saya dalam mengerjakan skripsi:

1. Kepada cinta pertama bagi anak perempuannya, Ayahanda tercinta bapak Kateni yang telah memberikan cinta kasih, tenaga, waktu dan kerja keras untuk anaknya bisa mencapai cita-cita dan melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Beliau salah satu orang yang menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan tahap akhir dari perkuliahan yaitu karya tulis ilmiah berupa skripsi.
2. Kepada pintu surgaku, ibu tercinta, Ibu Nanik Kasiyatun dan Ibu Isnaini do'a beliau yang tidak pernah terputus untuk anaknya. Do'a dan restu beliau yang selalu menjadi kunci keberhasilan, kesuksesan dan kebahagiaan dalam melangkah untuk mengambil keputusan. Terima kasih kepada Ibu yang selalu setia mendengarkan curhatan dari anakmu ini, keluh kesah hidup di perantauan dan juga cerita-cerita indah yang dialami anakmu ini. Beliau menjadi salah satu tujuan utama saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini yaitu membuat beliau bangga karena saya menjadi anak kedua yang mampu memiliki gelar sarjana di keluarga.

3. Kakek dan Nenek saya, Kakek Khoiri dan Nenek Napsiyah yang terus mendukung cucunya untuk berpendidikan tinggi dan mencapai cita-cita.
4. Kakak kandung saya yaitu Eka Putri Melinda, S.E yang selalu bertanya perihal *progres* dari penulisan skripsi saya dan selalu menjadi pengingat dikala saya akan menyerah. Dan Keponakan pertama saya Gilby Malik Atuqo yang selalu menjadi tempat hiburan bagi penulis dikala penulis sedang kurang semangat.
5. Sahabat seperjuangan saya yaitu Lilik Rahayu (Rara), Davino Rarendra (om dapan), Jibran Firmansyah, Yeni Kusmita, Sumarti dan Sahrul Hibat sahabat yang saya kenal sejak menjadi mahasiswa sampai akhirnya menjadi seperti keluarga, tempat saya berkeluh kesah dan saling mendukung satu sama lain tanpa menjadikan satu sama lain saingan.
6. Sahabat serta keluarga yang saya anggap seperti rumah pulangku ketika saya merasa penat akan masalah skripsi dalam perkuliahan ini Circle MAMI PAPI Kontrakan (sania, aan, adhin, daru, hasbi, Jibran, kiki, piki, syahrul) yang selalu menghibur dan memberi info- info agenda yang membuat saya merasa fresh dalam menjalani gilanya kehidupan perkuliahan.
7. Ucapan terimakasih dan rasa syukur saya kepada organisasi yang telah memberikan saya ruang-ruang diskusi yaitu Kopma Pandhalungan UIN Khas Jember, Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Relawan Pajak DJP Kanwil III yang telah memberikan tempat serta wadah wawasan bagi saya untuk terus mengembangkan ilmu dan pengetahuan.
8. Ucapan terimakasih dan rasa syukur saya kepada Paguyuban Putera Puteri Kampus Jawa timur 2024 yang sudah memberikan saya wadah serta

pengalaman baru untuk berkembang didunia pageant. Terimakasih atas Dedikasi, Kontribusi dan Prestasi.

9. Kepada teman-teman seperjuangan saya kelas Ekonomi Syariah 5 Angkatan 2021 telah menjadi teman seperjuangan untuk saling mengingatkan, menguatkan satu sama lain untuk mencapai suatu titik finis bersama yaitu wisuda. Dan semua Pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Dwi Oktavia, Nadia Azalia Putri, 2024: *Pengaruh Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2010-2023*

Kata Kunci: Kemiskinan, Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kemiskinan merupakan salah satu isu sosial yang masih menjadi perhatian serius di berbagai daerah, termasuk Provinsi Bali. Meskipun Bali dikenal sebagai destinasi wisata internasional dengan pendapatan daerah yang signifikan, fenomena kemiskinan tetap menjadi tantangan besar. Penelitian ini, dengan fokus pada determinasi kemiskinan, berupaya untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang telah dilaksanakan di bawah kerangka hukum yang diatur oleh UU No. 13 Tahun 2011. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Bali selama periode tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Apakah Indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010-2023?. 2) Apakah pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010-2023?. 3) Apakah ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010-2023?. 4) Apakah Indeks pembangunan manusia (IPM), pengangguran, dan ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010-2023?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder selama 14 tahun dari tahun 2010 hingga 2023. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel dengan data cross section 9 kabupaten/kota dan time series 14 tahun. Dalam regresi data panel menggunakan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Variabel dependen penelitian ini adalah kemiskinan, sedangkan variabel independen adalah pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan indeks pembangunan manusia (IPM).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali, ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali, IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Secara simultan pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan IPM berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

Penelitian ini mengungkapkan bahwasanya pengangguran mendorong kemiskinan di Provinsi Bali, tingginya angka pengangguran akan menyebabkan peningkatan jumlah kemiskinan. Peningkatan nilai IPM dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali, ketika masyarakat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas maka dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Sementara itu, penurunan jumlah ketimpangan pendapatan tidak dapat mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali, karena kemiskinan dapat teratasi tanpa mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa berkat seluruh limpahan Rahmat dan HidayahNya kami mampu menjadi insan ulul albab yang masih haus akan ilmu pengetahuan. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap mengalir deras ke pangkuan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menganggis kami dari alam kejahilan menuju alam yang terang-benderang . Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2010-2023” diserahkan ke Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar sarjana Ekonomi (S.E). Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan beberapa pihak baik secara langsung atau pun tidak langsung. Maka, kami persembahkan karya ini sebagai wujud rasa terimakasih kami kepada pihak yang turut mendukung pendidikan kami selama ini dan kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

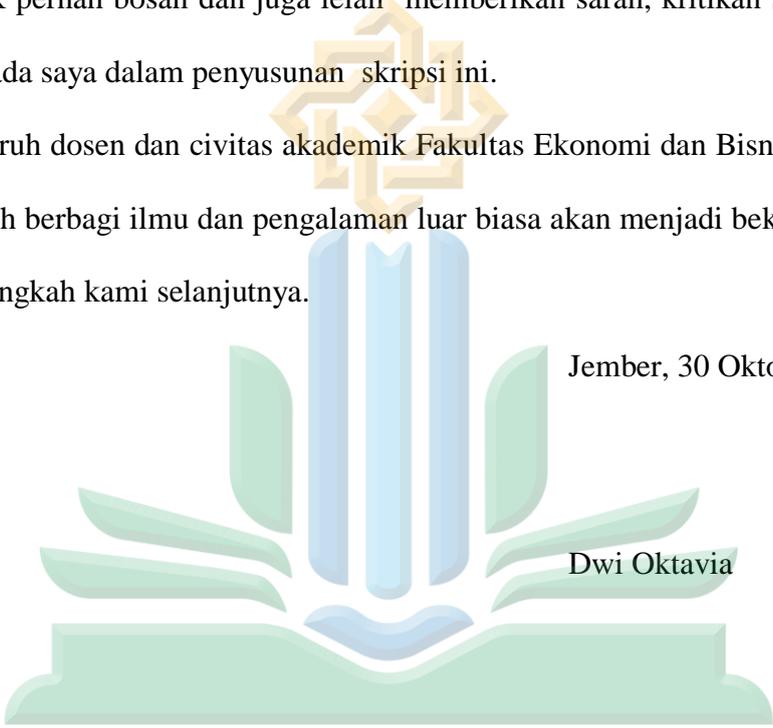
1. Rektor UIN KHAS, Prof. Dr. Hefni, S.Ag., M.M., CPEM. yang telah menjadi promotor dengan memberikan fasilitas pendidikan sebagai pendukung berjalannya system belajar kami selama ini.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Ubaidillah. M.Ag yang selalu memberikan arahan dan kebijakan sebagai penunjang proses belajar mahasiswa spesifiknya mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam.
3. Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam

sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

4. Sofiah, M.E selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah
5. Nadia Azalia Putri, M.M selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak pernah bosan dan juga lelah memberikan saran, kritikan serta masukan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman luar biasa akan menjadi bekal kami nanti di langkah kami selanjutnya.

Jember, 30 Oktober 2024

Dwi Oktavia

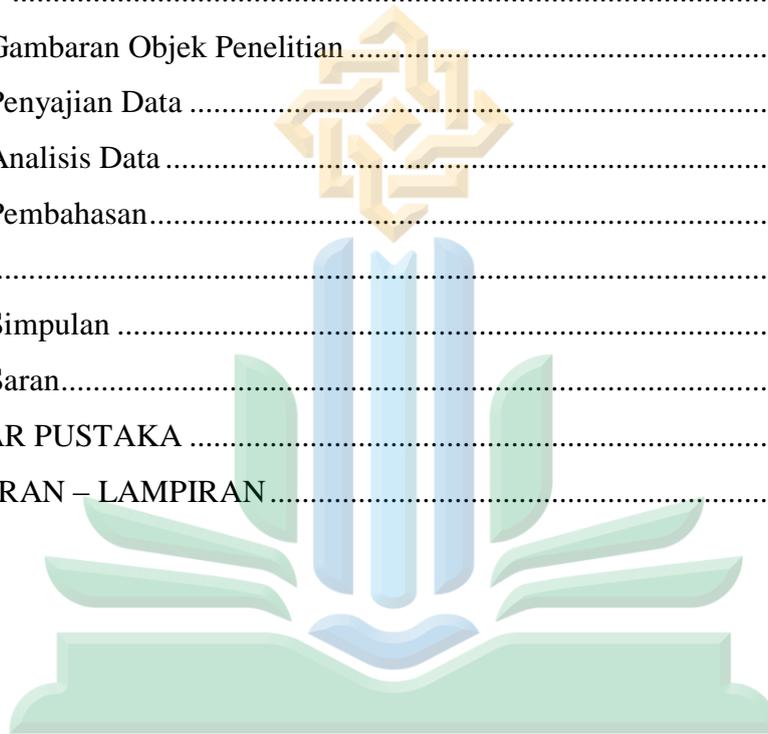


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	13
C.Tujuan Penelitian.....	13
D.Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup Penelitian	15
F. Definisi Operasional.....	17
G.Asumsi Penelitian.....	23
H.Hipotesis Penelitian	24
I. Sistematika Pembahasan	26
BAB II.....	27
A. Penelitian Terdahulu	27
B. Kajian Teori.....	38
1. <i>Determination of poverty</i>	38
2. Teori IPM.....	40
3. Teori Pengangguran	41
4. Teori Ketimpangan Pendapatan	43
5. Teori Kemiskinan.....	45

BAB III.....	49
A.Pendekatan dan Jenis Penelitian	49
B.Populasi dan Sampel.....	50
C.Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	51
D.Analisis Data.....	52
BAB IV	59
A.Gambaran Objek Penelitian	59
B.Penyajian Data	62
C. Analisis Data	70
D.Pembahasan.....	76
BAB V.....	90
A.Simpulan	90
B.Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	99



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Penduduk Miskin Provinsi Bali	7
Tabel 1. 2 Data Pengangguran Di Provinsi Bali	8
Tabel 1. 3 Data Ketimpangan Pendapatan Provinsi Bali	9
Tabel 1. 4 Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali	10
Tabel 1. 5 Indikator IPM, Pengangguran, dan Kemiskinan	17
Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	36
Tabel 4. 1 Wilayah Administrasi Provinsi Bali	60
Tabel 4. 2 PDRB Tahunan Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	62
Tabel 4. 3 Hasil Uji Chow	70
Tabel 4. 4 Hasil Uji Hausman	71
Tabel 4. 5 Hasil Estimasi Fixed Effect Model	71
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas	73
Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	74
Tabel 4. 8 Hasil Uji Autokorelasi	74

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI Haji Achmad Siddiq
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi	4
Gambar 1. 2 Kerangka Konseptual	23
Gambar 4.1 Peta Provinsi Bali	62
Gambar 4. 2 Data Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Tahun 2010 – 2023	65
Gambar 4. 3 Data Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali Tahun 2010 – 2023	66
Gambar 4. 4 Data Pengangguran Provinsi Bali Tahun 2010 – 2023	67
Gambar 4. 5 Data Gini Rasio Provinsi Bali Tahun 2010 – 2023.....	68
Gambar 4. 6 Data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Tahun 2010 – 2023	69
Gambar 4. 7 Hasil Uji Normalitas.....	73



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu isu sosial yang masih menjadi perhatian serius di berbagai daerah, termasuk Provinsi Bali. Meskipun Bali dikenal sebagai destinasi wisata internasional dengan pendapatan daerah yang signifikan, fenomena kemiskinan tetap menjadi tantangan besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Bali mengalami fluktuasi selama periode 2010-2023, dengan beberapa wilayah menunjukkan peningkatan yang signifikan.² Faktor-faktor seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, ketimpangan pendapatan, dan kurangnya lapangan pekerjaan menjadi beberapa penyebab utama yang memperparah kondisi kemiskinan di daerah ini.³

Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan landasan yuridis yang sangat relevan dengan penelitian tentang determinasi kemiskinan di Provinsi Bali selama periode 2010- 2023. UU ini mengatur penanganan fakir miskin secara komprehensif dan menetapkan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk mengurangi kemiskinan melalui berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Pasal-pasal dalam UU ini menekankan pada perlunya upaya sistematis dan terkoordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dalam

² "Statistik Indonesia 2023," Badan Pusat Statistik, diakses 16 Agustus 2024, [Badan Pusat Statistik Indonesia](https://www.bps.go.id)

³ Adhityas Firdaus, Taufiq C. Dawood, and Muhammad Abrar, "Determinants of Poverty in Indonesia: An Empirical Evidence using Panel Data Regression," *International Journal of Global Operations Research* 2, no. 4 (2021): 126. <https://doi.org/10.47194/ijgor.v2i4.90>.

mengentaskan kemiskinan, serta pentingnya data yang akurat dan terkini untuk mendukung kebijakan dan program yang efektif.⁴

Pemerintah pusat dan daerah wajib bekerja sama dalam mengatasi kemiskinan melalui kebijakan yang tepat sasaran, program bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks Provinsi Bali, UU ini menjadi sangat relevan mengingat Bali, sebagai salah satu daerah dengan perekonomian yang bergantung pada pariwisata, menghadapi tantangan khusus dalam penanganan kemiskinan. Fluktuasi tingkat kemiskinan yang terjadi selama periode 2010-2023 di Bali menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah perlu lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi ekonomi dan sosial yang dinamis.⁵

Penelitian ini, dengan fokus pada determinasi kemiskinan, berupaya untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang telah dilaksanakan di bawah kerangka hukum yang diatur oleh UU No. 13 Tahun 2011. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Bali selama periode tersebut. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih terarah bagi pemerintah daerah Bali untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan, sesuai dengan amanat UU ini, serta menyesuaikan strategi yang lebih sesuai dengan karakteristik dan tantangan

⁴ Sutikno, Eddy Setiadi Soedjono, Agnes Tuti Rumiayati, dan Lantip Trisuarono, "Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan Sistem," *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* 11, no. 1 (2015): 144. <https://doi.org/10.23917/jep.v11i1.339>.

⁵ "Fluktuasi Kemiskinan," Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diakses pada 19 Agustus 2024, [Profil Kemiskinan Provinsi Bali Maret 2024 - Badan Pusat Statistik Provinsi Bali](#).

unik yang dihadapi provinsi tersebut.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengimplementasikan berbagai program untuk mengurangi tingkat kemiskinan, namun hasilnya belum optimal. Program-program tersebut sering kali tidak mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah pedesaan yang terpencil.⁶ Selain itu, dampak pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun 2020 turut memberikan tekanan tambahan terhadap perekonomian lokal, mengakibatkan banyak penduduk jatuh ke dalam jurang kemiskinan⁷.

Dalam ajaran agama yang menekankan pentingnya keadilan sosial, kepedulian terhadap sesama, dan kewajiban untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Islam, sebagai salah satu agama yang dianut di Indonesia, memiliki pandangan yang kuat mengenai pentingnya pengentasan kemiskinan dan perlindungan terhadap kaum lemah. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menekankan pentingnya tanggung jawab sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan. Salah satu ayat yang relevan adalah Surah Al-Baqarah ayat 177:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِآءِ آخِرِ
وَالْمَلَآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

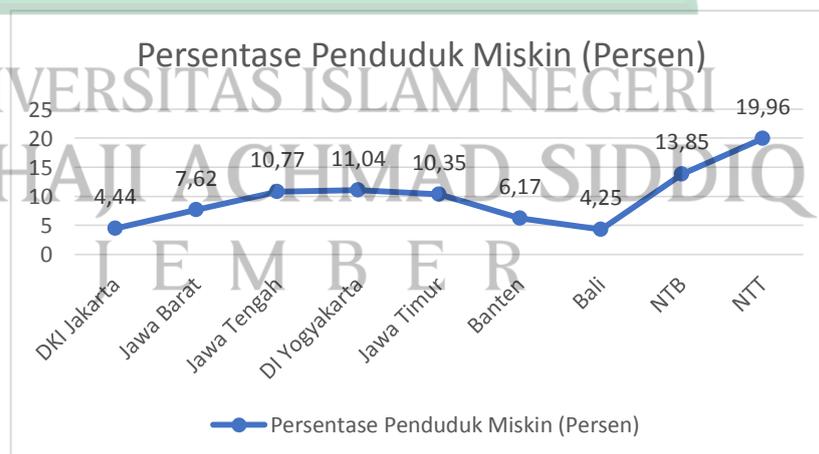
Artinya: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman

⁶ Younis Ali Ahmed, Biaban N. Rostam, and Burhan A. Mohammed, "The Effect of the Financial Crisis on Macroeconomic Variables in Iraq, Iran, and Turkey," *Economic Journal of Emerging Markets* 12, No.1 (2020): 55 <https://doi.org/10.20885/ejem.vol12.iss1.art5>.

⁷ Haning Romdiati and Dwiyantri Kusumaningrum, "Poverty during Covid-19 Pandemic in Indonesia: A Case Study in Java-Bali Region," *Jurnal Kawistara* 11, No.3 (2021): 239.

kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa (QS. Al-Baqarah: 177).

Ayat ini menegaskan bahwa kebajikan sejati tidak hanya terletak pada aspek ritual semata, tetapi juga pada kepedulian sosial, termasuk memberikan bantuan kepada orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Dalam konteks penelitian ini, ayat ini memberikan landasan religius bahwa upaya pengentasan kemiskinan adalah bagian dari kewajiban moral dan spiritual yang harus dijalankan oleh setiap individu dan masyarakat, termasuk pemerintah. Penelitian ini dapat dilihat sebagai kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan sosial dalam agama dapat diterapkan dalam kebijakan publik untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Bali.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023⁸

Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Tahun 2023

⁸ "Persentase Penduduk Miskin," Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, diakses 19 Agustus, 2024, <https://jatim.bps.go.id/statistics>.

Berdasarkan data dari BPS, Provinsi Bali pada tahun 2023 memiliki persentase jumlah penduduk miskin paling rendah dibandingkan dengan beberapa provinsi di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara yaitu sebesar 4,25 persen. Provinsi DKI Jakarta juga memiliki persentase jumlah penduduk miskin yang rendah sebesar 4,44 persen. Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki persentase jumlah penduduk miskin paling tinggi yakni sebesar 19,96 persen.

Menurut data BPS, tingkat kemiskinan di Provinsi Bali mengalami fluktuasi selama periode 2010-2023. Dari beberapa data untuk memperkuat penelitian ini terdapat penelitian yang relevan dari penelitian Bayu Wijaya Kusuma dan Anik Sri Widawati, Aceh menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Kusuma dan Widawati menekankan bahwa pertumbuhan pesat jumlah penduduk miskin menjadi salah satu alasan utama mengapa Aceh berada pada posisi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tingkat kemiskinan di Aceh dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jumlah penduduk, rata-rata lama sekolah (RLS), dan pengeluaran per kapita. Dengan menggunakan data sekunder dan pendekatan kuantitatif melalui analisis regresi data panel, penelitian Kusuma menemukan bahwa meskipun jumlah penduduk di Aceh memiliki pengaruh yang kecil dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, RLS dan pengeluaran per kapita memiliki dampak signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan daya beli masyarakat memainkan peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan

di Aceh.⁹

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Vania Grace Sianturi, M. Syafii, dan Ahmad Albar Tanjung, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia. Studi ini meneliti pengaruh tingkat pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan, menggunakan data panel dari 34 provinsi di Indonesia selama periode 2016 hingga 2019. Dengan metode analisis regresi data panel menggunakan perangkat Eviews10, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan di Indonesia.¹⁰

Secara parsial, temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya peningkatan jumlah penduduk cenderung meningkatkan angka kemiskinan. Sebaliknya, indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan, menunjukkan bahwa peningkatan IPM dapat mengurangi kemiskinan. Faktor-faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap kemiskinan, dengan beberapa di antaranya tidak signifikan. Penelitian ini memberikan wawasan penting bahwa

⁹ Bayu Wijaya Kusuma dan Anik Sri Widawati, "Analisis Determinasi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh, *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 8, No.1 (2024): 221. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3957>.

¹⁰ Vania Grace Sianturi, M. Syafii, dan Ahmad Albar Tanjung, "Analisis determinasi kemiskinan di Indonesia studi kasus (2016-2019), *Jurnal Samudra Ekonomika* 5, No.2 (2021): 125. <https://doi.org/10.33059/jse.v5i2.4270>.

meskipun ada upaya untuk meningkatkan ekonomi dan pemerataan pendapatan, faktor seperti pendidikan dan kualitas hidup masih menjadi kunci dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Tabel 1. 1 Data Penduduk Miskin Provinsi Bali

Tahun	Data Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali (Ribuan Jiwa)
2010	221,60
2011	183,10
2012	158,95
2013	182,77
2014	196,00
2015	196,71
2016	178,18
2017	180,13
2018	171,76
2019	163,85
2020	165,19
2021	201,97
2022	205,68
2023	193,78

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2010-2023¹¹

Analisis Data Kemiskinan, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) Provinsi Bali Tahun 2010-2023. Berdasarkan data penduduk miskin dari tahun 2010 hingga 2023, terlihat adanya fluktuasi yang signifikan dalam jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali. Pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin mencapai 221,60 ribu jiwa, yang kemudian mengalami penurunan signifikan hingga mencapai titik terendah pada tahun 2019 dengan 163,85 ribu jiwa. Namun, mulai tahun 2020 hingga 2022, terdapat peningkatan jumlah penduduk miskin, yang kemungkinan besar disebabkan

¹¹ "Data Penduduk Miskin," Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diakses 19 Agustus, 2024, <https://bali.bps.go.id/id>.

oleh dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2023, data menunjukkan sedikit penurunan, tetapi jumlah penduduk miskin masih berada pada angka 193,78 ribu jiwa, yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelum pandemi.

Tabel 1. 2 Data Pengangguran Di Provinsi Bali

Tahun	Data Pengangguran Provinsi Bali (Dalam Satuan Jiwa)
2010	68.791
2011	65.716
2012	48.230
2013	41.820
2014	44.126
2015	47.210
2016	46.484
2017	36.143
2018	35.811
2019	39.288
2020	144.500
2021	138.669
2022	131.469
2023	72.421

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2010-2023¹²

Data pengangguran provinsi Bali, data pengangguran menunjukkan tren yang serupa dengan data kemiskinan. Pada tahun 2010, tingkat pengangguran tercatat sebanyak 68.791 orang dan terus menurun hingga mencapai titik terendah pada tahun 2018 dengan 35.811 orang. Namun, pada tahun 2020, angka pengangguran melonjak tajam menjadi 144.500 orang, yang hampir pasti disebabkan oleh krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, mengingat sektor pariwisata yang menjadi andalan Bali sangat terpengaruh. Setelah itu, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2021

¹² "Data Pengangguran," Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diakses 19 Agustus, 2024, <https://bali.bps.go.id/id>.

hingga 2023, angka pengangguran tetap jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelum pandemi.

Tabel 1. 3 Data Ketimpangan Pendapatan Provinsi Bali

Tahun	Data Rasio Gini Provinsi Bali (Dalam Ribuan)
2010	0,3660
2011	0,4070
2012	0,4310
2013	0,4030
2014	0,4150
2015	0,3768
2016	0,3663
2017	0,3840
2018	0,3744
2019	0,3662
2020	0,3690
2021	0,3780
2022	0,3630
2023	0,3620

Sumber: Data BPS Provinsi Bali, 2010-2023¹³

Data Ketimpangan Pendapatan provinsi bali, data ketimpangan pendapatan menunjukkan tren yang serupa dengan data Pengangguran. Pada tahun 2010, tingkat ketimpangan pendapatan tercatat sebanyak 0,3660 dan terus meningkat hingga mencapai titik tertinggi pada tahun 2012 dengan nilai 0,4310. Namun, pada tahun 2020, angka ketimpangan pendapatan melonjak cukup tinggi sebesar 0,3690 namun tidak melebihi pada tahun 2012, yang hampir pasti disebabkan oleh krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, mengingat sektor pariwisata yang menjadi andalan Bali sangat terpengaruh. Setelah itu, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2015 hingga 2023, angka ketimpangan pendapatan tetap jauh lebih tinggi dibandingkan

¹³ "Data Ketimpangan Pendapatan," Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diakses 19 Agustus, 2024, <https://bali.bps.go.id/id>.

dengan periode sebelum pandemi.

Tabel 1. 4 Data IPM Provinsi Bali

Tahun	Data IPM (Ribuan Jiwa)
2010	70,10
2011	71,00
2012	71,62
2013	72,09
2014	72,48
2015	75,27
2016	73,65
2017	74,30
2018	74,77
2019	75,38
2020	75,50
2021	75,69
2022	76,44
2023	77,10

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2010-2023¹⁴

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali, indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bali menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2010 hingga 2023. Pada tahun 2010, IPM berada pada angka 70,10 dan terus meningkat hingga mencapai 77,10 pada tahun 2023. Meskipun demikian, peningkatan IPM ini tidak serta-merta diikuti dengan penurunan kemiskinan dan pengangguran, terutama pada periode setelah 2020. Ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas hidup dan akses terhadap pendidikan serta kesehatan meningkat, tantangan ekonomi akibat pandemi tetap menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap penduduk Bali.

Dari keempat data tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun IPM

¹⁴ "Data Indeks Pembangunan Manusia," Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diakses 19 Agustus, 2024, <https://bali.bps.go.id/id>.

di Provinsi Bali terus meningkat, hal ini tidak serta-merta mengurangi jumlah penduduk miskin, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, terutama pada periode pandemi COVID-19. Pemulihan ekonomi Bali pasca-pandemi tampaknya belum sepenuhnya mengembalikan kondisi seperti sebelum pandemi, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang lebih tepat dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi. Hal ini juga menegaskan perlunya penguatan sektor-sektor ekonomi di luar pariwisata untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih merata di Bali.

Berdasarkan data yang disajikan untuk periode 2010-2023, Provinsi Bali mengalami sejumlah fenomena sosial-ekonomi yang signifikan, terutama terkait dengan kemiskinan, pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin di Bali dari tahun 2010 hingga 2019, yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin mencapai 221,60 ribu jiwa, dan angka ini turun drastis hingga 163,85 ribu jiwa pada tahun 2019. Fenomena ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan ekonomi, sosial, dan program kesejahteraan yang diterapkan oleh pemerintah selama dekade ini berhasil mengurangi kemiskinan. Namun, pada tahun 2020 hingga 2022, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin yang signifikan, mencapai puncaknya di tahun 2022 dengan 205,68 ribu jiwa. Lonjakan ini erat kaitannya dengan dampak pandemi COVID-19, yang menghantam perekonomian Bali, terutama sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah tersebut.

Fenomena pengangguran di Bali menunjukkan pola yang hampir sama

dengan kemiskinan. Dari tahun 2010 hingga 2019, tingkat pengangguran menurun secara konsisten, yang mencerminkan peningkatan kesempatan kerja di wilayah tersebut. Namun, pada tahun 2020, terjadi lonjakan tajam dalam jumlah pengangguran, yang meningkat lebih dari tiga kali lipat dari tahun sebelumnya, mencapai 144.500 orang. Peningkatan ini disebabkan oleh penutupan bisnis, terutama di sector pariwisata dan industri pendukungnya, sebagai dampak langsung dari pandemi COVID-19. Meskipun angka pengangguran mulai menurun kembali setelah tahun 2021, hingga tahun 2023, tingkat pengangguran masih belum kembali ke level pra-pandemi, menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi masih berlangsung lambat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bali terus meningkat secara konsisten dari tahun 2010 hingga 2023. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas hidup, termasuk akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. IPM yang meningkat, dari 70,10 pada tahun 2010 menjadi 77,10 pada tahun 2023, mencerminkan upaya sukses dalam bidang pembangunan manusia. Namun, peningkatan ini tidak cukup untuk sepenuhnya mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran, terutama ketika terjadi krisis seperti pandemi COVID-19.

Fenomena yang terjadi di Bali selama periode 2010-2023 menunjukkan bagaimana perbaikan di bidang pembangunan manusia (IPM) dan penurunan kemiskinan serta pengangguran dapat terjadi dalam kondisi normal. Namun, ketika terjadi guncangan eksternal seperti pandemi COVID-19, perekonomian Bali yang sangat bergantung pada pariwisata mengalami kemunduran yang tajam, memicu lonjakan pengangguran dan peningkatan jumlah penduduk miskin. Hal ini menekankan pentingnya diversifikasi

ekonomi di Bali untuk menciptakan ketahanan yang lebih baik terhadap krisis, serta perlunya kebijakan yang lebih responsif dan inklusif untuk mengatasi dampak sosial-ekonomi yang timbul dari kejadian tak terduga.

Dengan adanya fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Pengaruh Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2010-2023”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah IPM berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010-2023?
2. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010-2023?
3. Apakah ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010-2023?
4. Apakah IPM, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010-2023?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian merupakan gambaran singkat mengenai arah yang akan dituju pada penelitian ini, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui apakah IPM berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010-2023.
2. Untuk mengetahui apakah pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010-2023.

3. Untuk mengetahui apakah ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010-2023.
4. Untuk mengetahui apakah IPM, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010-2023?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat dapat berupa kegunaan yang bersifat teori dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁵ Penelitian ini dapat diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teori

Penelitian ini dapat memperkaya literatur dan teori dalam bidang ekonomi konvensional, khususnya terkait dengan bagaimana indikator ekonomi konvensional seperti IPM, kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran diinterpretasikan dan dianalisis dalam perspektif ekonomi. Serta mengkaji sejauh mana pendekatan ekonomi dapat menjadi solusi bagi kebijakan ekonomi konvensional dalam mengatasi kemiskinan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Riset ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang penelitian dan penulisan karya ilmiah sebagai

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN KHAS Jember* (Jember: Penerbit UIN KHAS Jember, 2021), 65.

bekal untuk melakukan penelitian terkait peningkatan sumber daya manusia untuk mengurangi tingkat pengangguran dalam mengentaskan kemiskinan.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini juga diharapkan memberikan dampak khususnya bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember serta dapat menjadi sumber referensi dan koleksi pustaka yang dapat dijadikan sumber informasi bagi mahasiswa, dosen dan *civitas* akademik khususnya.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian dapat memberikan data empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Bali. Pemerintah daerah dapat menggunakan informasi ini untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, Dengan mengetahui pengaruh IPM, tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan, pemerintah dapat memprioritaskan program pembangunan yang memiliki dampak terbesar terhadap kesejahteraan masyarakat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Variabel Penelitian

Pada bagian ini peneliti harus menentukan variabel secara jelas dan tegas.¹⁶ Variabel dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi objek

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember* (Jember: Penerbit

penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.¹⁷

Variabel penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Variabel Independen

Secara umum variabel independen bisa disebut sebagai variabel stimulus, prediktor dan *antecedent*, Variabel Independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan pada variabel dependen.¹⁸ Variabel Independen (X) dalam penelitian ini meliputi:

X1 = Pengangguran

X2 = Ketimpangan Pendapatan

X3 = IPM

b. Variabel dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen.¹⁹ Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini :

Y = Kemiskinan

2. Indikator Variabel

Setelah variabel penelitian dipenuhi, kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan indikator-indikator penelitian yang merupakan rujukan

UIN KHAS Jember, 2021),39.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 161.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung, Alfabeta, 2016), 39.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 39.

empiris dari variabel yang akan diteliti.²⁰ Indikator variabel dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1. 5 Indikator IPM, Pengangguran, dan Kemiskinan

No.	Variabel	Indikator	Referensi
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Data Indeks Pembangunan Manusia	Sayifullah Sayifullah and Tia Ratu Gandasari, (2016). ²¹
2	Pengangguran	Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Ida Syafa'atur Rohmah and Jalu Aji Prakoso,(2022). ²²
3	Ketimpangan Pendapatan	Data Rasio Gini	Muhammad Farhan, Sugianto (maret 2022). ²³
4	Kemiskinan	Data Jumlah Penduduk Miskin	Dini Anggraini, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto,(2023). ²⁴

F. Definisi Operasional

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Sayifullah mengutarakan dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama dalam pola dasar pembangunan daerah. Ini menunjukkan bahwa IPM memiliki peran penting dalam manajemen pembangunan daerah. Fungsi IPM dan indikator pembangunan manusia

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, 40.

²¹ Sayifullah Sayifullah dan Tia Ratu Gandasari, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten", *Jurnal Ekonomi-Qu* 6, No.2 (2016): 236–55 <<https://doi.org/10.35448/jequ.v6i2.4345>>.

²² Ida Syafa'atur Rohmah dan Jalu Aji Prakoso, "Pengaruh Ipm, Rls, Tpt, Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat", *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 2, No.6 (2022): 255–66 <<https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.294>>.

²³ Muhammad Farhan dan Sugianto, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di pulau jawa," *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi Budaya, Teknologi dan Pendidikan* 1, No.4 (2022): 243.

²⁴ Dini Anggraini, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto Suharto, "Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Tirtayasa Ekonomika* 18, No.1 (2023):123 <<https://doi.org/10.35448/jte.v18i1.13613>>.

lainnya menjadi kunci untuk perencanaan dan pembangunan yang terarah. Sebagai tolak ukur pembangunan wilayah, IPM sebaiknya berkorelasi positif terhadap keberhasilan pembangunan.²⁵

Menurut Ida dan Aji Prakoso mengungkapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengklasifikasikan negara sebagai negara maju, berkembang, atau terbelakang, serta untuk mengevaluasi keberhasilan program sosial dan ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) adalah terobosan dalam menilai pembangunan manusia suatu negara. IPM digunakan untuk menentukan apakah suatu negara termasuk dalam kategori maju, berkembang, atau terbelakang. Selain itu, IPM juga berfungsi untuk mengevaluasi keberhasilan program sosial dan ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat.²⁶

Dapat disimpulkan bahwasannya indeks pembangunan manusia adalah suatu indikator yang dapat memberikan gambaran perkembangan pembangunan manusia secara terukur yang dapat disajikan dalam bentuk data. Berhasilnya suatu indikator manusia dapat dilihat melalui data indeks pembangunan manusia (IPM) dari

²⁵ Sayifullah Sayifullah dan Tia Ratu Gandasari, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten," *Jurnal Ekonomi-Qu* 6, No.2 (2016): 236–55 <<https://doi.org/10.35448/jequ.v6i2.4345>>.

²⁶ Ida Syafa'atur Rohmah dan Jalu Aji Prakoso, "Pengaruh Ipm, Rls, Tpt, Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat," *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 2, No.6 (2022):255–66 <<https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.294>>.

sana kita dapat melihat sejauh mana daerah tersebut untuk berkembang dan berhasil.

2. Pengangguran

Pengangguran atau Tuna Karya adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.

Menurut Mantra pengangguran adalah salah satu masalah besar yang sering terjadi di sebuah negara. Istilah pengangguran merujuk pada ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja bagi setiap penduduk yang berada dalam wilayah pemerintahannya.²⁷

Menurut Sadono Sukirno, menurunnya kesejahteraan masyarakat disebabkan oleh pengangguran, yang meningkatkan risiko terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki penghasilan.²⁸

Dapat disimpulkan bahwa pengangguran adalah seseorang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai. Dalam hal ini pengangguran juga dapat didefinisikan sebagai persentase dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan namun sedang mencari pekerjaan atau siap untuk bekerja.

3. Ketimpangan Pendapatan

²⁷ Lisa Marini dan Novi Tri Putri, "Peluang Terjadinya Pengangguran Di Provinsi Bengkulu : Seberapa Besar?," *Convergence: The Journal of Economic Development* 1, No.2 (2020):70–83 <<https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v1i2.10900>>.

²⁸ Dini Anggraini, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto Suharto, "Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Tirtayasa Ekonomika* 18, No.1 (2023):123 <<https://doi.org/10.35448/jte.v18i1.13613>>.

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat, akibat dengan adanya ketimpangan pendapatan akan menyebabkan yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin.²⁹

Ketimpangan pendapatan adalah selisih pendapatan antara penduduk Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama dan dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang diukur dengan indeks gini.³⁰ Ketimpangan pendapatan setidaknya juga didorong oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi yaitu inflasi, pengangguran, kemiskinan, kebijakan fiskal, dan lain lain. Ketimpangan pendapatan juga dapat diartikan perbedaan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah satu dengan daerah lain yang dimana dampaknya sangat berpengaruh terhadap masyarakat.

Menurut Simon Kuznets, mengemukakan bahwa ketimpangan pendapatan adalah perbedaan dalam distribusi pendapatan antara individu atau kelompok dalam masyarakat, yang cenderung meningkat selama tahap awal perkembangan ekonomi dan menurun pada tahap kemajuan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini dikemukakan dalam kurva Kuznets yang menggambarkan hubungan antara pendapatan per kapita dan

²⁹ Bakhtiar Al Yunussy Subrata, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur"

³⁰ Evanty Caesarisma dan Hamrullah, "Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2017-2021," *JEDS: Jurnal Ekonomi dan Dinamika Sosial* 2, No.2 (2023): 81.

ketimpangan pendapatan seiring dengan perkembangan ekonomi.³¹

Menurut Amartya Sen, Amartya Sen mendefinisikan ketimpangan pendapatan sebagai perbedaan dalam akses dan distribusi sumber daya ekonomi di antara individu. Ia memperluas pandangan tentang ketimpangan dengan menekankan pada aspek kesejahteraan dan kapasitas individu untuk menjalani kehidupan yang layak, bukan hanya sekedar distribusi pendapatan.³²

Dapat disimpulkan bahwa Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan dalam jumlah pendapatan yang diterima oleh individu atau kelompok. Ini dapat diukur dengan berbagai indikator, seperti rasio Gini atau kurva Lorenz, yang menunjukkan sejauh mana distribusi pendapatan menyimpang dari distribusi yang merata.

4. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan sekitarnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan atau keluar dari kerentanan.³³

Menurut Cahya mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang mengalami kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, tidak mempunyai dana untuk berobat ketika sakit, tidak bisa membaca karena

³¹ Simon Kuznets, "Economic Growth and Income Inequality," *The American Economic Review* XLV, No.1 (March 1955): 2.

³² Amartya Sen, *On Economic Inequality* (Oxford: Clarendon Press, 1973), 26.

³³ Sa'diyah, El Adawiyah, "Kemiskinan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya," *KHIDMAT SOSIAL, Journal of Social Work and Social Service* 1, No.1 (2020): 43.

tidak bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, dan secara keseluruhan ditandai oleh ketidakberdayaan, keterpinggiran, dan perasaan tidak bebas.³⁴

Sementara itu Kotze mengungkapkan bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memanfaatkan sumber daya melalui kesempatan yang ada. Meskipun bantuan luar kadang-kadang digunakan, ketergantungan pada dukungan eksternal tidak selalu pasti. Pendekatan pemberdayaan ini dianggap tidak berhasil karena tidak ada masyarakat yang dapat hidup dan berkembang dalam isolasi dari kelompok masyarakat lainnya. Isolasi ini menyebabkan sikap pasif, yang pada akhirnya memperburuk kondisi kemiskinan.³⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan yang dapat untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak. Kemiskinan merujuk pada kekurangan sumber daya ekonomi yang mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup. Ini dapat mencakup kekurangan pendapatan, akses terbatas terhadap layanan penting, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial.

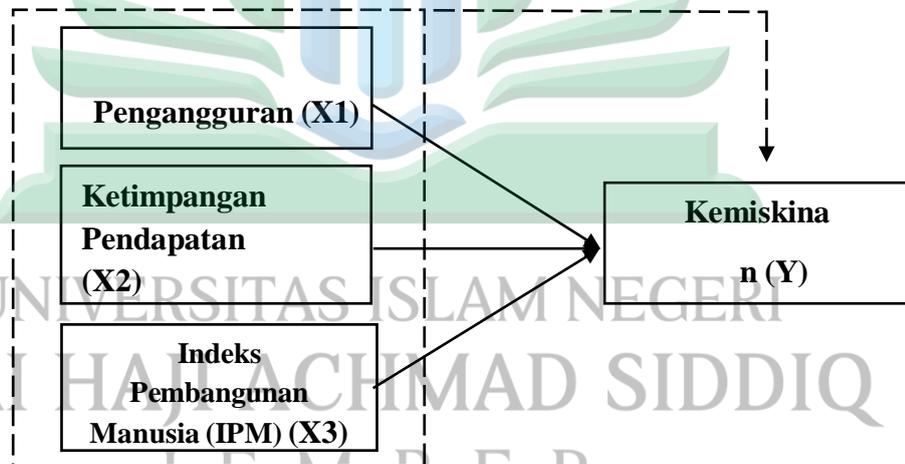
³⁴ Sari Wulandari,dkk., "Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah Dalam Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Inovasi Penelitian (JIP)* 2, No.10 (2022): 3209.

³⁵ Yulianto Kadji, "Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya," *CWL Publishing Enterprises, Inc.,Madison*, (2004):352 <<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract>>.

G. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian bisa disebut juga disebut anggapan dasar, yaitu sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti. Anggapan dasar harus dirumuskan secara jelas sebelum peneliti melangkah mengumpulkan data. Anggapan dasar disamping berfungsi sebagai dasar pijakan yang kukuh bagi masalah yang diteliti dan juga untuk mempertegas variabel yang menjadi pusat perhatian penelitian dan merumuskan hipotesis.³⁶ Berdasarkan penjelasan dari berbagai sumber sebagai bukti asumsi yang dibuat oleh penelitian ini adalah tingkat kemiskinan di pengaruhi oleh indeks pembangunan manusia, ketimpangan pendapatan dan pengangguran.

Gambar 1. 2 Kerangka Konseptual



Keterangan :

- > : Berpengaruh secara simultan
- > : Berpengaruh secara parsial

³⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, 41.

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Pada penelitian ini terdapat hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali

Pengangguran merupakan masalah yang serius bagi suatu daerah.

Pengangguran memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan; peningkatan tingkat pengangguran juga akan berkontribusi pada peningkatan kemiskinan di suatu wilayah. Penelitian yang dilakukan oleh. Penelitian yang dilakukan oleh Rujiman, Tarmizi, dan Febriangga Sembiring mendapatkan hasil bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.³⁷ Maka hipotesis yang di uji dalam penelitian ini adalah:

- H_0 : Pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.
- H_1 : Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

2. Ketimpangan Pendapatan berpengaruh terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali

Distribusi pendapatan merupakan cerminan atas merata atau timpangnya tingkat pendapatan dan hal ini merupakan penentu utama kemiskinan.

³⁷ Febriangga Sembiring, Tarmizi Tarmizi, dan Rujiman Rujiman, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Pengangguran Terbuka Dan Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara," *Jurnal Serambi Engineering* 5, No.2 (2020). <<https://doi.org/10.32672/jse.v5i2.1925>>.

Dimana kemiskinan itu sendiri sangat ditentukan atas rata-rata pengeluaran per kapita penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Ketimpangan pendapatan menjadi masalah disetiap daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan Aedy, Zainuddin Saenong, Tajudin,dkk mendapatkan hasil bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.³⁸ Maka hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah:

- H0 : Ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali.
- H1 : Ketimpangan Pendapatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

3. Pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat keberhasilan suatu wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. IPM terdiri dari

tiga indikator: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. IPM juga berpengaruh terhadap kemiskinan tinggi rendahnya angka kemiskinan salah satunya dipengaruhi oleh persentase IPM di wilayah tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Shidiq Ramdan Dinata, Mahendrara Romus, dan Yanti ini menemukan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

³⁸ Sitti Rachma Ramadhani Maskur, Hasan Aedy, dan Zaenudin Senong, "Pengaruh ketimpangan pendapatan, pengangguran dan pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2017-2021," *jurnal progress ekonomi pembangunan (JPEP)*, (2023).

kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2003-2018.³⁹ Maka hipotesis yang di uji dalam penelitian ini adalah:

- H0 : Indeks pembangunan manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.
- H1 : Indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, berisi rangkuman penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian saat ini dan memuat kajian teoritis yang menjadi dasar teori penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian, yang memuat tentang metode-metode yang digunakan peneliti meliputi pendekatan dan jenis penelitian, teknik dan instrument pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, berisi mengenai gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan yang akan menjadi titik temu, temuan baru serta hasil yang valid dalam penelitian ini.

BAB V Penutup, berisikan simpulan yang menjadi rangkuman dari setiap pembahasan pada hasil yang ditemukan, serta terdapat saran-saran dari peneliti terkait objek penelitian untuk dijadikan bahan bacaan.

³⁹ Shidiq R Dinata, Mahendra Romus, dan Yanti, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau Tahun 2003-2018," *Jurnal Al-Iqtishad* 2 (2020): 116.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian menyusun ringkasannya, baik dari penelitian yang sudah terpublikasikan maupun yang belum terpublikasikan. Langkah ini dilakukan untuk melihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang akan dilakukan.⁴⁰ Sehubungan dengan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi, acuan serta perbandingan dalam melakukan penelitian saat ini, yakni:

1. Bayu Wijaya Kusuma dan Anik Sri Widawati, "Analisis Determinasi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh," *Jurnal JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 8 No.1, Universitas Amikom Yogyakarta, 2024.⁴¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kemiskinan di provinsi aceh dipengaruhi oleh jumlah penduduk, rata rata lama bersekolah (RLS), dan pengeluaran per kapita. Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk, RLS (standar hidup relatif), dan pengeluaran per kapita mempunyai pengaruh yang signifikan dan simultan terhadap derajat kemiskinan di provinsi aceh. Yang kemudian datanya diolah menggunakan untuk mengolah data panel adalah dilakukan Uji

⁴⁰ Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (2023), 80.

⁴¹ Bayu Wijaya Kusuma dan Anik Sri Widawati, "Analisis Determinasi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh," *Jurnal JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 8 No.1(2024): 14.

Chow dengan menggunakan model *common effect* (CE) atau *fixed effect* (FE).

Dalam penelitian ini menghasilkan bahwasannya variabel jumlah penduduk dengan koefisien -1,7120 mempunyai pengaruh yang kecil namun negatif terhadap derajat kemiskinan di provinsi aceh. Variabel RLS memberikan pengaruh terhadap angka kemiskinan secara negative dan signifikan di provinsi aceh dengan memperoleh nilai koefisien sebanyak -5,6920. Nilai koefisien sebesar -6,6042 menunjukkan bahwa variabel yang menunjukkan pengeluaran per kapita mempunyai pengaruh negatif yang signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di provinsi aceh. Faktor jumlah penduduk, RLS, dan pengeluaran per kapita berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi aceh berdasarkan uji F. Variabel jumlah penduduk, pengeluaran per kapita, dan rata-rata lama pendidikan (RLS) menjelaskan 66,07% kemiskinan tingkat provinsi aceh; sisanya sebesar 33,93% disebabkan oleh variabel-variabel yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

2. Alfath Rizanda Putra dan Suharto, "Determinasi kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan* 2, No.2, (2023):143-148.⁴²

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel

⁴²Putri, Alfath Rizanda, dan Suharto, "Determinasi kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan* 2, No.2(2023):143.

⁴³ Aliyah Aisyah Mirrahma, Msy. Aziza Septiani, dan Maya Panorama, "DETERMINASI TINGKAT KEMISKINAN DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019-2022," *Jurnal JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* XIII, No.1 (2023): 13.

penentu (pendidikan, PDRB, dan UMK) terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data panel yang dimana menggabungkan kombinasi antara data time series dan data cross section. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di D.I. Yogyakarta, sementara UMK tidak berpengaruh terhadap dinamika kemiskinan di D.I. Yogyakarta.

3. Aliyah Aisyah Mirrahma, Msy. Aziza Septiani, dan Maya Panorama, "Determinasi Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Selatan Tahun 2019-2022," *Jurnal JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia XIII*, No.1 (2023) UIN Raden Fatah Palembang.⁴³

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap persentase penduduk miskin (PPM) di Sumatera Selatan periode tahun 2019-2022. Metode penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan amatan unit individu sebanyak 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dalam periode waktu empat tahun dari 2019 sampai 2022. Penelitian ini menggunakan satu perubah respon yaitu PPM dan empat peubah penjelas ialah tingkat pengangguran (TPT), rata-rata lama sekolah (RLS), PDRB Per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .

Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa model fixed effect dengan pengaruh spesifik dua arah adalah model terbaik dari tingkat

kemiskinan data panel. Variabel yang berpengaruh secara signifikan yaitu PDRB, RLS, dan IPM.

4. Iqbal, Maisyuri, Fauzan, dan Shalawati, "Determinasi Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh," *Jurnal JEMT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)* 7, No.3 (2023): 763- 770, STIE Lhokseumawe.⁴⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui IPM tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh, berbeda dengan PDRB dan pengangguran yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota provinsi aceh. Dalam penelitian ini menggunakan tiga metode alternatif *pooled least squares* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM).

Dalam penelitian ini menghasilkan bahwasannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Aceh. Berbeda dengan PDRB dan pengangguran yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

5. Muhammad Farhan dan Sugianto, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa," *Jurnal ilmiah bidang sosial, ekonomi budaya, teknologi dan pendidikan* 1, No.4

⁴⁴ Muttaqien, dkk, "Determinasi Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/ Kota Provinsi," *Jurnal JEMT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)* 7, No.3 (2023): 763.

(maret 2022).⁴⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan dengan menggunakan data dari 6 provinsi di Pulau Jawa periode 2014-2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel dengan model yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

Dalam penelitian hasil yang didapatkan adalah bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di pulau jawa, kemiskinan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di pulau jawa, indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di pulau jawa.

6. Fivien Muslihatiningsih, Jainal Abidin, "Analisis Kemiskinan Provinsi Jawa Timur," *Jurnal JEK: Jurnal Ekonomi Ekuilibrium* 4 No.2 (2020).⁴⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian ini adalah explanatory research yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah metode analisis data panel dengan pendekatan Random Effect dan dikaitkan dengan analisis deskriptif.

⁴⁵ Muhammad Farhan dan Sugianto, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa," *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi Budaya, Teknologi dan Pendidikan* 1, No.4(maret 2022):244.

⁴⁶ Fivien Muslihatiningsih dan Jainal Abidin, "Analisis Kemiskinan Provinsi Jawa Timur," *JEK: Jurnal ekonomi ekuilibrium* 4, No.2(2020):30.

Dalam penelitian ini menghasilkan bahwasannya kualitas sumber daya manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

7. Rekha Alfionika, Yulmardi, Hardiani, "Analisis Determinasi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi," *Jurnal Ekonomi Dan Sumberdaya Lingkungan* 10, No.1(2021).⁴⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2013-2018. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2013-2018.

Dalam penelitian ini menghasilkan bahwasannya berdasarkan hasil regresi data panel dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, dan TPAK secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Secara Parsial, variabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan dan negative

⁴⁷Rekha Alfionika, Yulmardi, dan Hardiani, "Analisis Determinasi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi," *Jurnal Ekonomi Dan Sumberdaya Lingkungan* 10, No.1(2021): 48.

terhadap tingkat kemiskinan, sementara variabel tingkat pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan alat analisis berupa estimasi model *fixed Effect model* (FEM). Hasil persamaan data panel tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, dan partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan.

7. Tasya Putri Indra Pranizty, Yustirania Septiani, “Determinasi Tingkat Kemiskinan Provinsi Indonesia 2016-2020,” *Jurnal EKOMBIS: JURNAL FAKULTAS EKONOMI* 7, No.2(2021): 119-132.⁴⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, meneliti dan menganalisis faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2016-2020. Jenis metode yang digunakan adalah pendekatan bersifat kuantitatif. Digunakan data sekunder, data sekunder didapatkan dari instansi atau lembaga terkait dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS), yang kemudian datanya diolah menggunakan metode FEM.

Dalam penelitian ini menghasilkan bahwasannyapengaruh TPT terhadap tingkat kemiskinan provinsi Indonesia 2016-2020 itu positif dan signifikan. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya lapangan pekerjaan

⁴⁸ Tasya Putri Indra Pranizty dan Yustirania Septiani, “Determinasi Tingkat Kemiskinan Provinsi Indonesia 2016-2020,” *Jurnal EKOMBIS: JURNAL FAKULTAS EKONOMI* 7, No.2 (2021): 119.

yang tersedia di Indonesia, sehingga mampu menyerap tenaga kerja, pengaruh *dependency ratio* terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia itu negative dan tidak signifikan, pengaruh pendidikan dengan proksi APS tingkat SMA terhadap kemiskinan di provinsi di Indonesia itu signifikan. Seluruh variabel independen bersama-sama secara simultan mempengaruhi tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2016-2020.

8. Vania Grace Sianturi, M. Syafii, dan Ahmad Albar Tanjung, "Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus 2016-2019," *Jurnal Samudra Ekonomika* 5, No.2 (September 2021).⁴⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif dengan data sekunder. Objek dari penelitian ini yaitu seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi. Penelitian ini menggunakan data panel, yaitu menggunakan data *time series* dan *cross sections* selama 4 tahun yaitu tahun 2016-2019. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel dengan alat analisis Eviews10.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa tingkat pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan

⁴⁹ Vania Grace Sianturi, M. Syafii, dan Ahmad Albar Tanjung, "Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus 2016-2019" *Jurnal Samudra Ekonomika* 5, No.2 (September 2021): 126.

ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, dan tingkat pengangguran berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan. Secara parsial tingkat pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

8. Marisa, "Analisis determinasi kemiskinan di Indonesia," *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 2, No.1 (2019): 76-89.⁵⁰

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, inflasi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data time series berupa data tahun periode 1997-2017. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kointegrasi dan *Error Correction Model* (ECM) serta model regresi linear berganda. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah memberikan implikasi bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan variabel makroekonomi yang berperan utama dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

⁵⁰ Marisa, "Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia," *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 2, No.1(2019):76.

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Bayu Wijaya Kusuma, Anik Sri Widawati, 2024.	Analisis determinasi tingkat kemiskinan di provinsi aceh 2018-2022	a. Menggunakan variabel terikat yang sama yaitu kemiskinan	a. menggunakan 3 variabel jumlah penduduk, rata-rata lama bersekolah (RLS), dan pengeluaran per kapita.
2.	Alfath Rizanda Putra, Suharto, 2023.	Determinasi kemiskinan di Provinsi D.I.Yogyakarta	a. variabel kemiskinan b. teknik analisis data panel	a. 3 variabel berbeda (PDRB, Pendidikan, UMK)
3.	Aliyah Aisyiyah mirrahma1, Msy Aziza Septiani, Maya Panorama, 2023.	Determinasi tingkat kemiskinan di Sumatra selatan tahun 2019-2022	a. Menggunakan 2 variabel bebas yang sama yaitu Indeks pembangunan manusia (IPM) dan pengangguran. b. Menggunakan variabel terikat yang sama yaitu kemiskinan.	a. Menggunakan 5 variabel persentase penduduk miskin (PPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), rata-rata lama sekolah (RLS), Indeks pembangunan manusia (IPM), dan PDRB per kapita.
4.	Ulfa Rahmi, Eliza Nopita, 2023.	Determinasi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh	a. Menggunakan 2 variabel bebas yang sama yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran b. Menggunakan variabel terikat yang sama yaitu kemiskinan.	a. Menggunakan variabel PDRB.
5.	Muhammad Farhan, Sugianto, 2022.	Analisis faktor faktor mempengaruhi ketimpangan pendapatan di pulau jawa	a. variabel ketimpangan pendapatan b. regresi data panel	a. membahas faktor-faktor

6.	Fivien Muslihatiningsih, Jainal Abidin, 2022.	Analisis Kemiskinan Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan 1 variabel bebas yang sama yaitu pengangguran b. Menggunakan variabel terikat yang sama yaitu kemiskinan 	a. Menggunakan 3 variabel Kualitas sumber daya manusia, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi.
7.	Rekha Alfionika, Yuliardi, Hardiani, 2021.	Determinasi tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	<ul style="list-style-type: none"> a. variabel pengangguran, kemiskinan b. menggunakan data panel c. metode analisis deskriptif kuantitatif 	a. variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan TPAK
8.	Tasya Putri Indra Pranizty, Yustirania Septiani, 2021.	Determinasi Tingkat Kemiskinan Provinsi Indonesia 2016-2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan 1 Variabel bebas yang sama yaitu Pengangguran b. Menggunakan variabel terikat yang sama yaitu kemiskinan. 	a. Menggunakan 4 variabel tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), <i>dependency ratio</i> , dan pendidikan (APS, APM, dan APK tingkat SMA).
9	Vania Grace Sianturi, M. Syafii, Ahmad Albar Tanjung, 2021.	Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia 2016-2019	<ul style="list-style-type: none"> a. 4 variabel yang sama (indeks pembangunan manusia, ketimpangan pendapatan, pengangguran dan kemiskinan) b. data panel 	a. variabel pertumbuhan penduduk
10.	Marisa, 2019.	Analisis determinasi kemiskinan di Indonesia	a. variabel pengangguran dan tingkat kemiskinan	a. 3 variabel berbeda (pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, inflasi).

B. Kajian Teori

1. *Determination of poverty*

Determination of poverty (determinasi kemiskinan) merujuk pada proses identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dalam suatu wilayah. Teori ini berupaya menjelaskan hubungan antara variabel-variabel ekonomi, sosial, dan demografis yang secara kolektif menentukan apakah suatu populasi berada dalam kemiskinan.⁵¹

a. Teori Kapabilitas (*Capability Approach*)

Menurut Amartya Sen, teori ini menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya soal kurangnya pendapatan, tetapi juga kurangnya kemampuan individu untuk mencapai kehidupan yang layak.⁵² Menurut Sen, kemiskinan terjadi ketika orang tidak memiliki "kapabilitas" untuk menjalani kehidupan yang berharga. Kapabilitas ini mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kebebasan dalam memilih. Oleh karena itu, determinasi kemiskinan

dalam teori ini melihat faktor-faktor seperti pendidikan dan kesehatan sebagai komponen penting yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu wilayah.

b. Teori Sirkulasi Kemiskinan (*Cycle of Poverty*)

Menurut teori sirkulasi kemiskinan, kemiskinan adalah sebuah lingkaran setan yang sulit diputus. Kemiskinan menciptakan kondisi

⁵¹ Syamsul Amar, "Determination of Poverty, Unemployment, Economic Growth, and Investment in West Sumatra Province," *Intenational Journal of Sustainable Development & Planning* 17, No.4 (2022): 45.

⁵² Amartya Sen, *On Economic Inequality* (Oxford: Claredon Press, 1973), 58.

yang memperkuat kemiskinan itu sendiri, seperti kurangnya pendidikan, rendahnya akses terhadap pekerjaan, dan kurangnya modal untuk berinvestasi dalam kesehatan dan pendidikan anak. Teori ini relevan dalam determinasi kemiskinan, di mana faktor-faktor seperti tingkat pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan memperkuat kemiskinan dari generasi ke generasi.⁵³

c. Teori Pertumbuhan dan Kemiskinan

Simon Kuznets berpendapat bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat sebelum akhirnya menurun ketika negara mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Hal ini dikenal sebagai "Kurva Kuznets". Dalam konteks determinasi kemiskinan, teori ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu mengurangi kemiskinan secara langsung, terutama jika distribusi pendapatan tidak merata.⁵⁴

d. Teori Modernisasi dan Ketergantungan

Teori modernisasi berpendapat bahwa kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh kurangnya pembangunan ekonomi dan modernisasi yang lambat. Sebaliknya, Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*) menyatakan bahwa kemiskinan di negara-negara berkembang disebabkan oleh eksploitasi ekonomi oleh negara-negara maju. Kedua teori ini dapat digunakan untuk

⁵³ Oscar Lewis, "The Culture of Poverty," 19.

⁵⁴ Simon Kuznets, "Economic Growth and Income Inequality," *American Economic Review* XLV, No.1 (1955): 2.

memahami determinasi kemiskinan dalam konteks global dan lokal, terutama bagaimana pertumbuhan ekonomi di Bali dapat dipengaruhi oleh dinamika global dan nasional.⁵⁵

2. Teori IPM

IPM adalah ukuran yang digunakan untuk menilai perkembangan suatu negara berdasarkan tiga dimensi utama: kesehatan (diukur melalui harapan hidup), pendidikan (diukur melalui rata-rata tahun sekolah dan harapan tahun sekolah), dan standar hidup (diukur melalui pendapatan per kapita). IPM memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kemajuan sosial dan ekonomi suatu negara dibandingkan dengan hanya menggunakan pendapatan nasional.

Menurut Oscar Lewis, kemiskinan adalah sebuah lingkaran setan yang sulit diputus. Kemiskinan menciptakan kondisi yang memperkuat kemiskinan itu sendiri, seperti kurangnya pendidikan, rendahnya akses terhadap pekerjaan, dan kurangnya modal untuk berinvestasi dalam kesehatan dan pendidikan anak. Teori ini relevan dalam determinasi kemiskinan, di mana faktor-faktor seperti tingkat pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan memperkuat kemiskinan dari generasi ke generasi.⁵⁶

Dalam pembangunan ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prioritas utama dengan maksud melindungi lima kepentingan dasar: harta, agama, jiwa, akal, dan keturunan. Seperti yang

⁵⁵ Andre Gunder Frank, *Capitalism and Underdevelopment in Latin America: Historical Studies of Chile and Brazil* (New York: Monthly Review Press, 1967).

⁵⁶ Oscar Lewis, *The Culture of Poverty*, 19.

dijelaskan dalam Qur'an Surah Az-Zariyat (56):

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Tidaklah aku menciptakan jinda manusia kecuali dengan maksud beribadah kepada-Ku.”⁵⁷

Ayat yang dikutip tersebut menyatakan bahwa manusia diciptakan dengan tujuan sebagai khalifah dan hamba Allah. Ketika mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang Islam, manusia dipandang sebagai pusat pembangunan. Dalam proses pembangunan, manusia dipandang sebagai subjek dan objek aktif yang terus ditingkatkan. Pandangan dunia Islam, yang menekankan bahwa manusia adalah aktor utama dalam kehidupan dan pembangunan.

3. Teori Pengangguran

Pengangguran adalah kondisi di mana individu yang mampu dan siap untuk bekerja tidak mendapatkan pekerjaan. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya lowongan pekerjaan, keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, atau kondisi ekonomi yang buruk. Pengangguran dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk pengangguran struktural, siklis, friksional, dan sukarela.

Menurut David Ricardo seorang ekonom klasik, mengembangkan pandangan bahwa pengangguran dapat terjadi akibat kekakuan dalam struktur pasar tenaga kerja. Menurutnya, jika upah ditetapkan di atas tingkat keseimbangan pasar, maka akan ada surplus tenaga kerja yang

⁵⁷ Qur'an Kementerian Agama, diakses pada tanggal 22 Desember 2024, Pukul 11.49, <https://quran.kemenag.go.id/>.

menyebabkan pengangguran.⁵⁸

Dalam sudut pandang Islam, pengangguran didefinisikan sebagai keadaan tidak bekerja atau belum menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan potensi seseorang. Tujuan pengentasan pengangguran dalam Islam yakni dengan maksud memenuhi kebutuhan fisik dan rohani individu serta membantu orang lain dengan ekonomi melalui sedekah, infak, dan zakat. Pengangguran dalam Islam tidak hanya berarti tidak memiliki pekerjaan, tetapi juga tidak memiliki tujuan dan keberkahan dalam hidup.⁵⁹ Islam mengajarkan etos kerja yang tinggi dan menganggap bekerja sebagai ibadah yang bernilai. Dalam Qur'an surah At-Talaq (7) Allah berfirman :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya : “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dibandingkan apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”⁶⁰

Ayat diatas memberikan pengertian Islam menekankan kewajiban bekerja dengan maksud memenuhi kebutuhan dan membantu orang lain.

Kerja diartikan sebagai aktivitas dinamis yang bertujuan memenuhi

⁵⁸ David Ricardo, *On the Principles of Political Economy and Taxation* (London: John Murray,1817).

⁵⁹ Ali Ridlo, "Persoalan Pengangguran Dan Kewajiban Kerja Menurut AL Syaibani," *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, No.1 (2022), 12.

⁶⁰ Qur'an Kementerian Agama, diakses pada tanggal 22 Desember 2024, Pukul 11.49, <https://quran.kemenag.go.id/>.

kebutuhan tertentu, di mana seseorang berupaya dengan menunjukkan komitmen yang teguh terhadap keunggulan sebagai bukti kekagumannya kepada Allah SWT.

4. Teori Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah kondisi di mana pendapatan tidak terdistribusi secara merata di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Ini mengacu pada perbedaan yang signifikan dalam jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai segmen populasi, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, keterampilan, akses terhadap peluang ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Ketimpangan pendapatan sering kali diukur menggunakan indeks Gini, di mana nilai 0 menunjukkan kesetaraan sempurna dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan maksimal. Ketimpangan ini dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Simon Kuznet mengemukakan bahwa ketimpangan pendapatan cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan ekonomi, kemudian menurun seiring dengan kemajuan.⁶¹ Kuznets berpendapat bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat sebelum akhirnya menurun ketika negara mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Hal ini dikenal sebagai "*Kurva Kuznets*". Dalam konteks determinasi kemiskinan, teori ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu mengurangi kemiskinan secara

⁶¹ Simon Kuznets, "Economic Growth and Income Inequality," *The American Economic Review* XLV, No.1 (1955):22.

langsung, terutama jika distribusi pendapatan tidak merata.⁶²

Ketimpangan pendapatan dalam perspektif Islam dipahami sebagai ketidakseimbangan distribusi kekayaan yang dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Islam menekankan pentingnya keadilan sosial dan ekonomi, dengan tujuan agar setiap individu dapat menikmati hak yang sama untuk memperoleh rezeki yang cukup dan adil. Dalam prinsip ekonomi Islam, salah satu nilai utama adalah keadilan dalam distribusi kekayaan. Hal ini tercermin dalam banyak ayat Al-Qur'an yang menyerukan agar kekayaan tidak berputar hanya di kalangan orang kaya dan tidak dimanfaatkan dengan cara yang tidak sah. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah (2:282), Allah menegaskan larangan untuk mengambil harta secara tidak adil, yang berpotensi menyebabkan ketimpangan.⁶³

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

⁶² Kuznets, 2.

⁶³ Qur'an Kementerian Agama, diakses pada tanggal 22 Desember 2024, Pukul 11.49, <https://quran.kemenag.go.id/>.

وَأَقُومُوا لِلشَّهَادَةِ وَأَدِّينَ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

5. Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki cukup sumber daya atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan dapat

bersifat absolut, di mana seseorang hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan, atau relatif, yang mengacu pada ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup yang dianggap layak dalam masyarakat tertentu. Kemiskinan juga dapat mencakup faktor-faktor seperti kurangnya akses terhadap kesempatan kerja dan kekurangan dalam infrastruktur sosial dan ekonomi.

Menurut Amartya Sen, teori ini menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya soal kurangnya pendapatan, tetapi juga kurangnya kemampuan individu untuk mencapai kehidupan yang layak.⁶⁴ Menurut Sen, kemiskinan terjadi ketika orang tidak memiliki "kapabilitas" untuk menjalani kehidupan yang berharga. Kapabilitas ini mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kebebasan dalam memilih. Oleh karena itu, determinasi kemiskinan dalam teori ini melihat faktor-faktor seperti pendidikan (IPM) dan kesehatan sebagai komponen penting yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu wilayah.

Teori modernisasi berpendapat bahwa kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh kurangnya pembangunan ekonomi dan modernisasi yang lambat.⁶⁵ Sebaliknya, teori ketergantungan (*Dependency Theory*) menyatakan bahwa kemiskinan di negara-negara berkembang disebabkan oleh eksploitasi ekonomi oleh negara-negara maju. Kedua teori ini dapat digunakan untuk memahami determinasi kemiskinan dalam konteks global dan lokal, terutama bagaimana

⁶⁴ Amartya Sen, *On Economic Inequality* (Clarendon Press: Enlarged edition, 1997), 58.

⁶⁵ W. W. Rostow, *The stages of economic growth*, *The economic history review* 12, No.1.

pertumbuhan ekonomi di Bali dapat dipengaruhi oleh dinamika global dan nasional.⁶⁶

Dibandingkan dengan konsep kemiskinan dalam ekonomi konvensional, kemiskinan dalam ekonomi Islam lebih bernuansa dan lebih sesuai dengan kenyataan. Kemiskinan tidak terbatas pada masalah material saja dalam ekonomi Islam; tetapi juga mencakup aspek spiritual. Meskipun memiliki beberapa kesamaan dengan ekonomi konvensional dalam pemaknaan kemiskinan material, ekonomi Islam menekankan dimensi spiritual dan moral yang cenderung luas.⁶⁷

Kemiskinan menurut Al-Isfahani dan Ibnu Manzur mendefinisikan dengan menggambarkan orang-orang yang tidak mampu membeli barang-barang yang mereka butuhkan dengan maksud memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan menjadi miskin akibat dari kelambanan mereka. Ketidakmampuan mereka dengan maksud memperoleh sumber daya berasal dari kurangnya dorongan, tekad, atau kesempatan dengan maksud bertindak. Gagasan ini konsisten dengan pelajaran yang diberikan dalam Qur'an Surah Al-Kahfi (79) dalam Al-Quran:⁶⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁶ Andre Gunder Frank, "Capitalism and Underdevelopment in Latin America: Historical Studies of Chile and Brazil," New York: Monthly Review Press, 1967.

⁶⁷ Muhammad Iqbal, "Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah* 12, No.2(2018): 10.

⁶⁸ Lukman Hakim dan Ahmad Danu Syaputra, "Al-Qur'an Dan Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, No.3 (2020): 629 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1310>>.

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدْتُ أَنْ أُعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ

مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٦﴾

Artinya : “Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka, aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja (zalim) yang mengambil setiap perahu (yang baik) secara paksa.”⁶⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁹ Qur'an Kemenag, diakses pada tanggal 8 Juli 2024, Pukul 10.09, <https://quran.kemenag.go.id/>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif adalah metode yang berlandaskan atas fenomena yang dapat diamati, terukur, konkrit, dan relatif tetap. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menentukan, mengetahui, serta menganalisis dengan menggunakan alat analisis data yang dipilih sesuai dengan fenomena sehingga nanti hasilnya digeneralisasikan sesuai hasil dengan menggunakan alat analisis data yang dipilih.⁷⁰ Jenis penelitian yang dipilih yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian untuk menggambarkan, mendeskripsikan secara rinci mengenai fenomena yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan data Panel, yaitu gabungan antara data runtun waktu (*time series*) dengan data silang (*cross section*) semua Kabupaten/Kota yang ada di Bali. Penelitian ini menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. Jenis penelitian yang diterapkan adalah kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih yang bersifat independen, guna memperoleh gambaran tentang variabel tersebut.⁷¹

⁷⁰ Abd. Muhith, Rachmad Bitulah, dan Amirul Wahid: *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bildung,2020),11.

⁷¹V.Wiratna dan Sujarweni: *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif* (Yogyakarta: PustakaBaru Press, 2018), 19.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum dan terdiri dari berbagai bidang yang akan diteliti. Dengan kata lain, populasi mencakup seluruh kelompok orang, peristiwa, atau barang yang menjadi minat peneliti untuk diteliti.⁷²

Dalam Penelitian ini menggunakan populasi di Provinsi Bali yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali yang diambil data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran, ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan dari tahun 2010-2023.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi tersebut.⁷³ Jika populasi terlalu besar sehingga peneliti tidak dapat mempelajarinya secara keseluruhan, misalnya karena keterbatasan waktu, biaya, atau tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi penelitian.

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah *Non-Probability Sampling* dengan teknik *sampling jenuh*. *Sampling jenuh* adalah teknik yang melibatkan semua anggota populasi sebagai sampel.⁷⁴

Istilah lain dari sampel jenuh adalah *sensus*, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Penelitian ini menggunakan sampel semua

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2017), 80.

⁷³ Sugiyono, 81.

⁷⁴ Sugiyono, 82.

Kabupaten/Kota yang ada di Bali dengan data *cross section* data tahunan yang digunakan dan data *time series* dari tahun 2010-2023. Data yang digunakan mencakup IPM, pengangguran, Ketimpangan Pendapatan dan tingkat kemiskinan. Metode penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan amatan unit individu sebanyak 8 Kabupaten dan 1 Kota Provinsi Bali dalam periode waktu tiga belas tahun dari 2010 sampai 2023.

C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Metode utama dalam proses penelitian adalah pengumpulan data, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Teknik dalam pengumpulan data perlu diperhatikan untuk relevansi terhadap analisis data yang peneliti gunakan. Proses penelitian dan hasilnya sangat dipengaruhi oleh langkah pengumpulan data, kesalahan teknis, proses dan hasil penelitian akan dipengaruhi langsung oleh proses pengumpulan data penelitian. Secara umum pengumpulan data didefinisikan sebagai proses pengumpulan data untuk digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis, perencanaan strategis, penelitian, dan tujuan lainnya.⁷⁵ Dengan kata lain, pengumpulan data didefinisikan sebagai penggunaan metode dan instrumen yang telah ditentukan dan diuji validitas dan reliabilitasnya.

Teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data panel dari data BPS Provinsi Bali. Dari data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti, selanjutnya peneliti akan

⁷⁵ Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Tangerang: Pascal Book, 2021), 189

memilih data yang akan dikelola dalam BPS. Data dalam BPS akan dikelola menggunakan alat analisis data yang sudah dipilih oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian.

D. Analisis Data

Dalam menganalisis determinasi kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010-2023, peneliti menggunakan metode analisis regresi data panel, yang menggabungkan data *time series* dan *cross section*. Data *time series* merujuk pada kumpulan data yang dikumpulkan dalam interval waktu tertentu secara berkelanjutan, sementara *cross section* adalah data yang dikumpulkan pada titik waktu tertentu.⁷⁶ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 13 tahun terakhir dari 2010 sampai 2023, dengan jumlah sampel yang digunakan yaitu 8 Kabupaten dan 1 Kota yang ada di Bali.

1. Model Penelitian

Model analisis menggunakan model Regresi Data Panel sebagai berikut:

Regresi data panel adalah model regresi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau beberapa perubahan prediktor terhadap suatu perubahan respon dengan struktur yang berupa data panel. Model yang digunakan adalah model regresi data panel dengan rumus:

⁷⁶ Aminatus Zahriyah dkk., *Ekonometrika Teknik dan Aplikasi dengan SPSS* (Jember: Mandala Press, 2021), 2.

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y = Kemiskinan

β_1 = Koefisien Regresi Pengangguran

β_2 = Koefisien Regresi Ketimpangan Pendapatan

β_3 = Koefisien Regresi Indeks Pembangunan Manusia

X_1 = Pengangguran

X_2 = Ketimpangan Pendapatan

X_3 = Indeks Pembangunan Manusia

α = Konstanta

i = 9 Kabupaten/ Kota Provinsi Bali

t = Tahun 2010 – 2023

e = Error

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal.

Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman secara empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka ($n > 30$), maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Namun untuk memberikan kepastian, data yang berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji statistik normalitas. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa

dipastikan berdistribusi normal, demikian sebaliknya data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu berdistribusi normal, untuk itu perlu suatu pembuktian. Uji statistik normalitas yang digunakan di antaranya Chi-Square, Kolmogorov Smirnov, Liliefors, Shapiro Wilk, Jarque Bera.⁷⁷

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Pada model regresi dapat dikatakan baik adalah homokedastic atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data cross section, dimana data panel lebih dekat ke ciri data cross section dibandingkan dengan time series biasanya terjadi pada data cross section, di mana data panel lebih dekat ke ciri data cross section dibandingkan time series.⁷⁸

c. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas menurut Ghozali (2001), bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antarvariabel independen. Pendeteksian multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai Variance Inflation Factors (VIF). Kriteria pengujian pada multikolinearitas yaitu apabila nilai VIF

⁷⁷ Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews)* (PT Raja Grafindo Persada, 2016).

⁷⁸ , Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya di Daerah Istimewa Yogyakarta,” (Skripsi, Universitas Jember, 2019).

< 10 maka tidak terdapat multikolinearitas di antara variabel independen, dan sebaliknya apabila nilai VIF seluruhnya > 10 , sehingga asumsi model tersebut mengandung multikolinearitas. Multikolinearitas perlu dilakukan pada saat regresi linier menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, maka tidak mungkin terjadi multikolinearitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4 - dL)$ maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- 2) Jika d terletak antara dU dan $(4 - dU)$, maka hipotesis nol diterima berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Jika d terletak antara dL dan dU atau di antara $(4 - dU)$ dan dL , maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

3. Uji Statistik

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan uji signifikansi parameter uji T (secara parsial), uji F (secara simultan) dan Koefisien Determinasi (R^2).

a. Uji T (secara parsial)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independennya secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas t.

1) Apabila nilai probabilitas $t <$ taraf signifikansi (0,05), artinya variable Kemiskinan (dependen) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variable indeks pembangunan manusia, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan (independent) .

2) Apabila nilai probabilitas $t <$ taraf signifikansi (0,05), artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.⁷⁹

b. Uji F (secara simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah semua koefisien regresi berbeda dengan nol atau dengan kata lain bahwa model tersebut dapat diterima. Hipotesis yang diuji dari pendugaan persamaan adalah variabe; bebas yang berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas. Selain itu, Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel

⁷⁹ Adir Nurmansyah, *Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya di Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta: Mandalapres,2019).

independen secara serentak terhadap variabel dependen. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan probabilitas F. Apabila nilai prob $F <$ taraf signifikansi artinya variabel indeks pembangunan manusia (IPM), pengangguran dan ketimpangan pendapatan (independent) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan (dependen).⁸⁰ Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama, menggunakan uji F membuat hipotesis sebagai berikut.

- 1) $H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$, artinya variabel IPM, Ketimpangan Pendapata dan Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
- 2) $H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$, artinya variabel IPM, Ketimpangan Pendapata dan Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Uji F ini dilakukan dengan membandingkan nilai taraf nyata (α) yang ditetapkan dan nilai probabilitasnya F-statistiknya. Dari uji F dapat diketahui bahwa suatu model dapat diterima atau tidak. Kriteria pengujian:

- 1) Probability F-statistik $<$ nilai ($\alpha = 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima
- 2) Probability F-statistik $>$ nilai ($\alpha = 0,05$), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

⁸⁰ Naura Fadir Fenazya, "Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya di Daerah Istimewa Yogyakarta," (Skripsi, Universitas Jember, 2019), 11.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen dalam suatu model untuk menjelaskan variabel dependennya. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai dengan 1, semakin mendekati 1 maka model semakin baik . Apabila nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak Geografis Provinsi Bali

Provinsi Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Provinsi Bali terdiri dari Pulau Bali dan pulau-pulau kecil antara lain Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan Pulau Serangan. Provinsi Bali secara keseluruhan memiliki 85 pulau, termasuk yang tidak berpenghuni. Provinsi Bali terletak di antara $8^{\circ}3'38''$ - $8^{\circ}50'56''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}25'53''$ - $115^{\circ}42'39''$ Bujur Timur.

Bali merupakan pulau yang indah dengan panjang garis pantai sekitar 633,35 km. Di Pulau Bali terdapat gunung berapi, sungai-sungai, dan danau. Keberadaan gunung berapi memberikan kesuburan tanah untuk usaha pertanian. Gunung Batur dan Gunung Agung menjadi gunung berapi aktif di Pulau Bali, dan gunung tertinggi adalah Gunung Agung dengan tinggi 3.148 mdpl yang terletak di Kabupaten Karangasem. Selain itu juga terdapat beberapa gunung yaitu Gunung Lempuyang, Gunung Abang, Bukit Penulisan, serta terdapat hutan lindung Batukaru dan Taman Nasional Bali Barat. Ditengah deretan pegunungan tersebut terdapat sumber air berupa empat buah danau yakni Danau Tamblingan, Danau Buyan, Danau Beratan dan Danau Batur.⁸¹

⁸¹ "Letak Geografis Pulau Bali," Tata Ruang Provinsi Bali, diakses pada 12 November 2024, <https://tarubali.baliprov.go.id/sekilas-bali/>

Provinsi Bali memiliki luas sekitar 5.636,66 km². Batas wilayah sebelah utara yaitu Laut Bali, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Bali, dan sebelah timur Selat Lombok. Kondisi geografis wilayah Bali Utara adalah dataran rendah yang sempit. Kondisi tersebut sangat berbeda dengan wilayah Bali Selatan. Dataran rendah di Bali Selatan menghampar dari Kabupaten Jembrana di barat hingga Kabupaten Karangasem di timur, dan wilayah ujung selatan terdapat semenanjung yaitu Benoa. Secara administrasi Provinsi Bali terdiri dari sembilan kabupaten/kota.⁸²

Tabel 4. 1 Wilayah Administrasi Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah	
				Desa	Lingkungan
1.	Kab. Jembrana	841,80	5	51	248
2.	Kab. Tabanan	839,33	10	131	794
3.	Kab. Badung	418,52	6	62	536
4.	Kab. Gianyar	368,00	7	70	546
5.	Kab. Klungkung	315,00	4	59	244
6.	Kab. Bangli	520,81	4	72	343
7.	Kab. Karangasem	839,54	8	78	581
8.	Kab. Buleleng	1.365,88	9	148	610
9.	Kota Denpasar	127,78	4	43	405
	Provinsi Bali	5.636,66	57	714	4.307

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2019⁸³

2. Keunggulan Wilayah Provinsi Bali

Penduduk di Pulau Bali sebagian besar merupakan menganut agama Hindu. Hampir pada setiap sudut wilayah terdapat pura

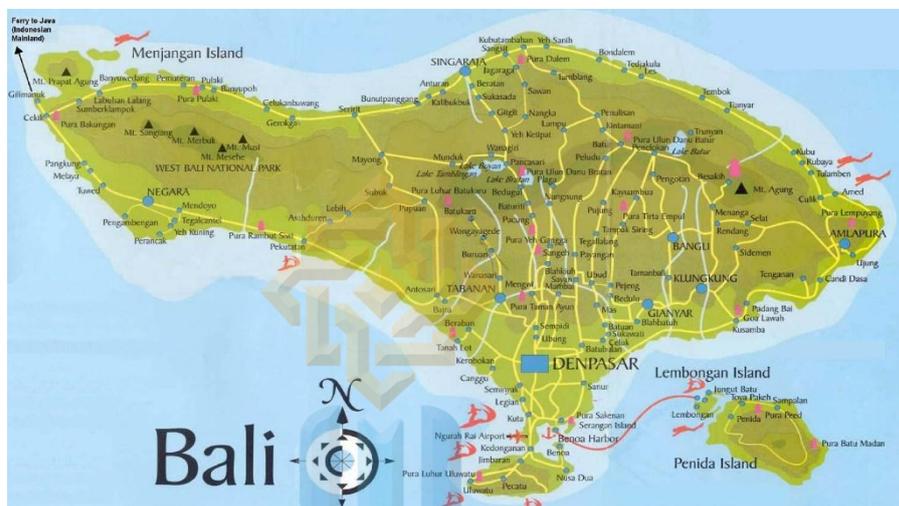
⁸² "Letak Geografis Pulau Bali, " Tata Ruang Provinsi Bali, Diakses pada 12 November 2024, <https://tarubali.baliprov.go.id/sekilas-bali/>

⁸³ "Wilayah Administrasi," Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diakses 12 Oktober , 2024, <https://bali.bps.go.id/id>.

peribadatan, baik pura besar yang dipakai sebagai tempat upacara bersama maupun pura kecil yang ada di setiap rumah. Selain dikenal sebagai Pulau Dewata, Bali juga disebut dengan Pulau Seribu Pura. Ritual keagamaan yang kental dapat memengaruhi hampir setiap unsur dan gerak kehidupan masyarakat Bali. Sehingga hal tersebut menjadikan Bali tidak hanya memiliki pemandangan yang indah tetapi juga kebudayaan yang unik, eksotis, dan terjaga. Bali adalah tujuan wisata internasional yang sering kali lebih dikenal daripada Indonesia. Bali sebagai tujuan pariwisata utama memiliki kekayaan dan keindahan alam, serta keunikan dari seni budayanya. Sektor pariwisata menjadi andalan, bukan hanya oleh Pemerintah Provinsi Bali, namun seluruh lapisan masyarakat yang berharap dari sektor jasa ini.

Potensi sumber daya alam di Provinsi Bali mencakup kekayaan alam diberbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kebudayaan dan pariwisata, serta sumber daya hutan. Kabupaten Buleleng, Tabanan, Karangasem, Jembrana, Klungkung, dan Bangli memiliki sektor unggulan berupa sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Sektor ini menjadi sektor yang terspesialisasi dan mampu untuk dilakukan kegiatan ekspor karena dapat melayani kegiatan di luar daerah. Daerah dengan sektor unggulannya yang berupa sektor penyediaan akomodasi dan makan minum adalah Kabupaten Badung, Buleleng, dan

Kota Denpasar. Hal tersebut didukung oleh keberadaan Kabupaten Badung dan Kota Denpasar sebagai destinasi wisata di Provinsi Bali.⁸⁴



Sumber: Bali Convention Center, 2019⁸⁵

Gambar 4. 1 Peta Provinsi Bali

B. Penyajian Data

1. Penyajian Data Wilayah Provinsi Bali

Penyajian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu cara untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah atau daerah tertentu selama periode waktu tertentu. PDRB adalah salah satu indikator penting dalam perekonomian suatu daerah karena mencerminkan aktivitas ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut. PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan, tergantung pada tujuan analisisnya. Penyajian PDRB

⁸⁴ Yuendini, Emi Puspita, Ismi Nurafifa Rachmi, Novanda Nurul, dan Rika Harini, “Analisis Potensi Ekonomi Sektor Pertanian dan Sektor Pariwisata di Provinsi Bali Menggunakan Teknik Analisis Regional,” *Jurnal Geografi* 16, No.2(2019):128–136. <https://doi.org/10.15294/jg.v16i2.20831>

⁸⁵ “Peta Provinsi Bali,” Bali Convention Center, diakses pada 12 November 2024, <https://tarubali.baliprov.go.id/sekilas-bali/>

memberikan gambaran tentang kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap perekonomian daerah dan membantu dalam perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih efektif.⁸⁶

Tabel 4. 2 PDRB Tahunan Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

PDRB Lapangan Usaha (Seri 2010)	PDRB Tahunan Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah)			
	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21.269.187,73	21.338.451,58	21.146.432,90	21.022.027,03
B. Pertambangan dan Penggalian	1.362.771,04	1.363.738,43	1.426.411,88	1.447.479,87
C. Industri Pengolahan	9.694.782,42	9.701.452,16	10.240.993,51	10.472.563,50
D. Pengadaan Listrik dan Gas	282.807,27	268.432,56	311.445,52	354.558,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	337.261,52	323.911,00	322.251,82	333.695,66
F. Konstruksi	15.856.017,26	15.843.028,75	16.439.958,81	16.589.352,70
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.219.219,02	14.016.090,67	14.817.390,21	15.616.978,01
H. Transportasi dan Pergudangan	8.062.814,56	6.638.325,10	8.070.176,32	10.110.816,13
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	23.902.892,38	21.460.209,09	24.441.901,31	28.391.842,75
J. Informasi dan Komunikasi	12.375.042,02	12.713.885,43	12.639.579,68	12.858.499,21
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6.456.680,58	6.244.502,04	6.750.327,70	7.651.310,48
L. Real Estate	7.504.590,21	7.541.644,84	7.716.792,68	7.756.109,51
M. N Jasa Perusahaan	1.736.624,24	1.681.047,78	1.824.127,85	1.949.663,11
O. Administrasi	8.921.600,56	8.987.386,85	8.632.766,73	8.539.731,05

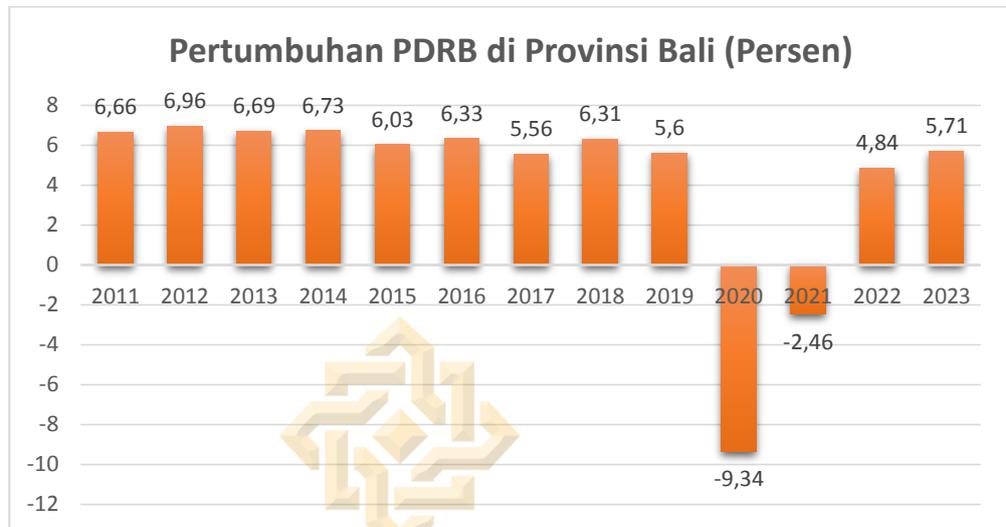
⁸⁶ Sajono Sukirno, *Teori mikroekonomi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 30

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial				
P. Jasa Pendidikan	8.916.706,34	8.987.386,85	8.989.232,81	8.976.159,14
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.042.261,33	4.269.264,85	4.314.725,92	4.410.788,71
R, S, T, U Jasa Lainnya	2.557.684,70	2.506.491,91	2.745.881,03	2.965.958,39
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	147.498.943,17	143.871.677,91	150.830.405,67	159.447.578,27

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024⁸⁷

Berdasarkan data PDRB Provinsi Bali tahun 2020 hingga 2023, penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sektor dengan penyumbang PDRB terbesar dari tahun ke tahun. Meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, tetapi pada tahun 2022 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga memiliki peranan penting dalam PDRB Provinsi Bali. Dapat dilihat bahwa sektor tersebut tetap stabil meskipun pada tahun 2020 dan 2021 terdapat pandemi Covid-19. Sehingga selain sektor pariwisata, sektor pertanian juga menjadi unggulan untuk meningkatkan jumlah PDRB. Sektor konstruksi mengalami perkembangan yang pesat dalam penyumbang PDRB Provinsi Bali, terutama dalam pembangunan infrastruktur pariwisata dan perumahan.

⁸⁷ "PDRB Atas dasar harga konstan," Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diakses 10 November 2024, <https://bali.bps.go.id/id>.



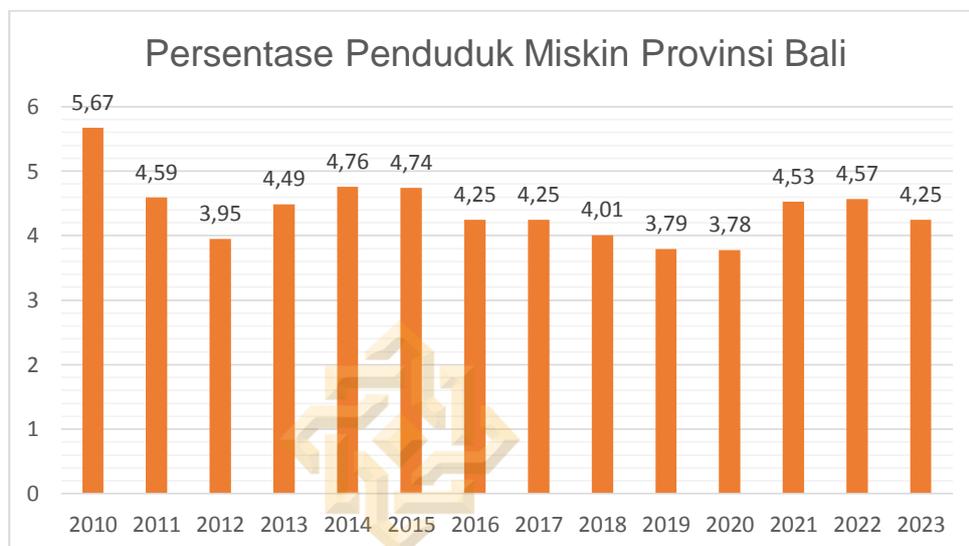
Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024⁸⁸

Gambar 4. 2 Data Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Tahun 2010 – 2023

Berdasarkan data diatas pertumbuhan PDRB dari tahun 2011 hingga 2023, Provinsi Bali mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 hingga 2019 mengalami pertumbuhan yang stabil. Namun pada tahun 2020 mengalami gejolak perekonomian akibat dari Pandemi Covid-19, sehingga mengalami pertumbuhan ke arah negatif.

Dengan adanya upaya pemulihan yang intensif dari pemerintah Provinsi Bali, hingga berhasil mengalami angka pertumbuhan yang positif di tahun 2023. Perekonomian Provinsi Bali yang di dorong oleh sektor pariwisata telah pulih dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan PDRB ke arah yang lebih baik lagi.

⁸⁸ “PDRB Provinsi Bali,” Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diakses 12 Oktober , 2024, <https://bali.bps.go.id/id>.



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024⁸⁹

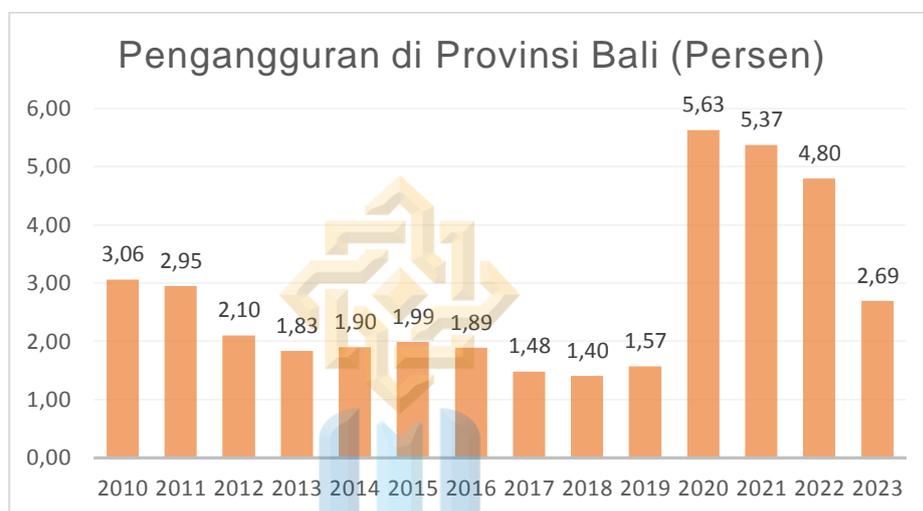
Gambar 4. 3 Data Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali Tahun 2010 – 2023

Berdasarkan data persentase kemiskinan Provinsi Bali diatas menunjukkan terdapat penurunan yang jangka panjang dari tahun 2011 hingga 2020. Namun terjadi peningkatan angka kemiskinan pada tahun 2021 yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Dampak dari Pandemi

Covid-19 sangat memengaruhi perekonomian Provinsi Bali, yang mana sebagian besar penduduknya sangat menggantungkan hidup dari sektor pariwisata. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi angka penyebaran Covid-19 menyebabkan banyak penduduk yang kehilangan pekerjaannya, sehingga mereka tidak memiliki pendapatan. Tetapi pada tahun 2023 terdapat

⁸⁹ “Data Persentase Penduduk Miskin,” Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diakses 12 Oktober , 2024, <https://bali.bps.go.id/id>.

pemulihan ekonomi dan persentase angka kemiskinan mengalami penurunan.



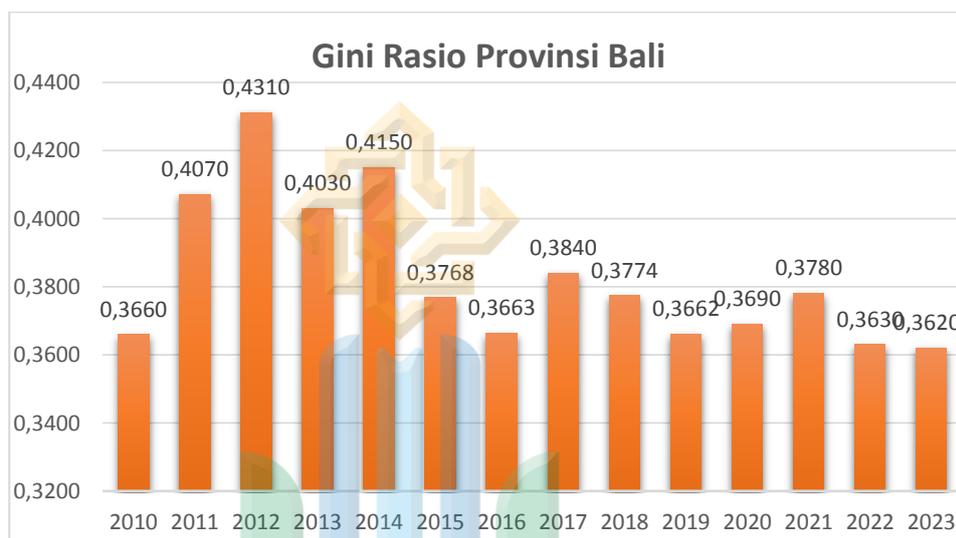
Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024⁹⁰

Gambar 4. 4 Data Pengangguran Provinsi Bali Tahun 2010 – 2023

Berdasarkan data pengangguran diatas pada tahun 2011 hingga 2019 mengalami fluktuasi, namun tidak signifikan. Berkembang pesatnya sektor pariwisata di Provinsi Bali, sehingga mendorong sektor-sektor lain seperti perdagangan dan konstruksi. Hal tersebut dapat berdampak pada angka pengangguran yang terbilang kecil. Pada tahun 2020 terdapat Pandemi Covid-19 yang menyebabkan angka pengangguran mengalami peningkatan yang signifikan. Pandemi Covid-19 menghentikan hampir seluruh kegiatan pariwisata, sehingga banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya terutama yang dibagian sektor jasa. Pada tahun 2021 hingga 2023 mengalami pemulihan ekonomi, mulai diberlakukannya kebijakan new normal pasca pandemi, meskipun dengan berbagai syarat dan

⁹⁰ "Data Pengangguran," Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diakses 12 Oktober , 2024, <https://bali.bps.go.id/id>.

ketentuan. Hal tersebut membuat wisatawan kembali melakukan kunjungan ke Bali, sehingga memengaruhi penyerapan tenaga kerja di sektor terkait dan dapat menurunkan angka pengangguran.



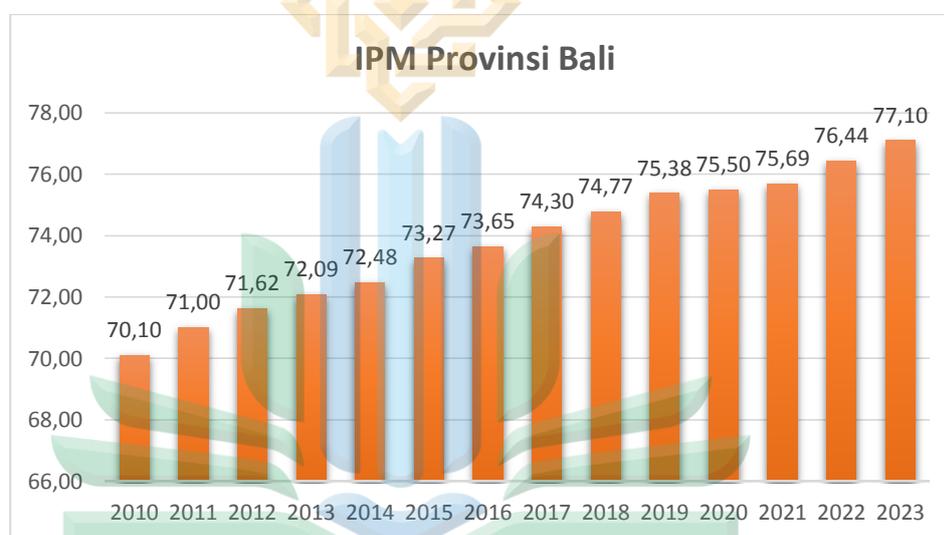
Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024⁹¹

Gambar 4. 5 Data Gini Rasio Provinsi Bali Tahun 2010 – 2023

Berdasarkan data gini rasio Provinsi Bali, tahun 2010 hingga 2015 mengalami peningkatan. Dalam tahun tersebut Bali mengalami perkembangan ekonomi yang pesat, terutama pada sektor pariwisata. Hal tersebut memunculkan ketidakmerataan pendapatan, karena sektor tersebut cenderung menciptakan ketimpangan dengan daerah tingkat perkembangan pariwisatanya lebih tinggi, seperti Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dengan daerah yang lebih terpinggirkan. Daerah-daerah urban yang lebih berkembang seperti Kota Denpasar dan Kabupaten Badung cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah pedesaan. Penurunan perekonomian di

⁹¹ "Data Gini Rasio," Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diakses 12 Oktober , 2024, <https://bali.bps.go.id/id>.

Provinsi Bali akibat dari pandemi covid-19 tahun 2020 menyebabkan ketimpangan pendapatan menurun untuk sementara, tetapi adanya pemulihan ekonomi yang tidak merata membuat ketimpangan kembali meningkat pada tahun 2021. Pada tahun 2022 hingga 2023 mengalami penurunan ketimpangan pendapatan, karena pariwisata Bali sudah dibuka untuk wisatawan baik domestik maupun mancanegara.



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2014⁹²

Gambar 4. 6 Data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Tahun 2010 – 2023

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh berkembangnya bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun pada faktanya terdapat ketimpangan antar daerah terkait kualitas kesejahteraan penduduknya. Seperti Kabupaten Karangasem tahun 2023 yang menjadi daerah dengan

⁹² “Data IPM,” Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diakses 12 Oktober , 2024, <https://bali.bps.go.id/id>.

IPM terendah di Provinsi Bali yakni sebesar 68,91, sedangkan Kota Denpasar menjadi daerah dengan IPM tertinggi sebesar 84,73.

C. Analisis Data

Metode penelitian ini menggunakan analisis data regresi data panel. Dimana analisis regresi bertujuan mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen yang digunakan.

1. Pemilihan Model Terbaik

a. Uji Chow

Tabel 4. 3 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	18.031045	(8,114)	0.0000
Cross-section Chi-square	103.033138	8	0.0000

Sumber: Eviews 12, 2024

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model yang terbaik

antara (CEM) dengan (FEM) digunakan signifikansi Chow. Hasil uji chow menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 dengan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$ (5%) maka dapat diputuskan bahwa model menggunakan Fixed Effect dikarenakan $0,0000 < 0,05$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak maka diputuskan menggunakan model Fixed Effect.

b. Uji Hausman

Tabel 4. 4 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.098631	3	0.0044

Sumber: Eviews 12, 2024

Uji ini digunakan untuk menentukan model apakah yang akan digunakan FEM atau Random Effect Model (REM) yang paling efektif. Uji hausman menunjukkan nilai Probabilitas hitung sebesar $0.0044 < \alpha$ (5%), P-Value signifikan H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga metode yang paling tepat digunakan adalah FEM.

2. Hasil Estimasi FEM

Berdasarkan uji Chow dan uji Hausman, model yang terpilih dalam estimasi data panel adalah FEM. Hasil estimasi regresi dengan model FEM yang dapat dilihat dari pengaruh pengangguran, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010 hingga 2023, maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.97735	1.755550	9.670670	0.0000
X1	1.240526	0.033532	1.208569	0.0293
X2	-0.328500	0.000157	-2.083204	0.3950
X3	-2.101526	0.000232	-6.569852	0.0045

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	0.522680	R-squared	0.795823	

Mean dependent var	4.887937	Adjusted R-squared	0.885771
S.D. dependent var	1.625849	S.E. of regression	0.549501
Akaike info criterion	1.730782	Sum squared resid	34.42251
Schwarz criterion	2.000904	Log likelihood	-97.03927
Hannan-Quinn criter.	1.840524	F-statistic	89.11732
Durbin-Watson stat	2.331363	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Eviews 12, 2024

$$Y = 16.97735 + 1.240526 X_1 - 0.328500 X_2 - 2.101526 X_3 + e_{it}$$

Berdasarkan hasil analisis pendekatan FEM, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai Intersep (Konstanta)

Berdasarkan persamaan diatas didapatkan nilai intersep (konstanta) sebesar 16.97735 yang berarti bahwa jika nilai dari variabel independen pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan indeks pembangunan manusia sama dengan nol, maka kemiskinan di Provinsi Bali pada tahun 2010 hingga 2023 akan meningkat sebesar 16,97 persen.

2. Pengangguran (X1)

Nilai koefisien variabel pengangguran sebesar 1,240526, artinya apabila pengangguran meningkat 1 persen, maka akan meningkatkan kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010 hingga 2023 sebesar 1,24 persen.

3. Ketimpangan Pendapatan (X2)

Nilai koefisien variabel ketimpangan pendapatan sebesar -0,328500, artinya apabila ketimpangan pendapatan meningkat 1 persen, maka

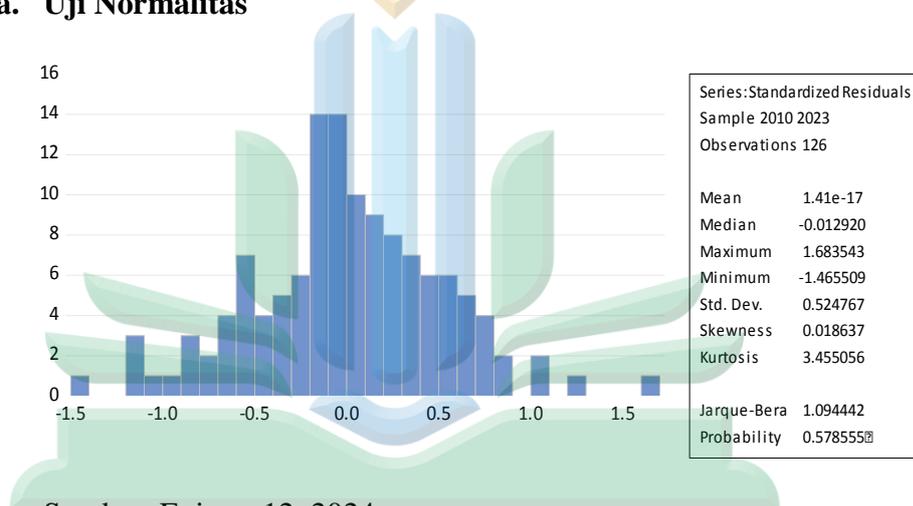
akan menurunkan kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010 hingga 2023 sebesar 0,33 persen.

4. IPM (X3)

Nilai koefisien variabel IPM sebesar -2,101526, artinya apabila IPM meningkat 1 persen, maka akan menurunkan kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010 hingga 2023 sebesar 2,10 persen.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Sumber: Eviews 12, 2024

Gambar 4. 7 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pengujian di atas nilai probabilitas sebesar 0.578555, yang artinya nilai probabilitas lebih besar dari α (0,05). Maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.487491	0.379748
X2	0.487491	1.000000	0.185986
X3	0.379748	0.185986	1.000000

Sumber: Eviews 12, 2024

Berdasarkan hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa nilai korelasi antar variabel independen lebih besar dari 0,1 dan lebih kecil dari 0,9. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model data panel tidak mengandung unsur multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.564137	6.795709	0.377317	0.7067
X1	0.019901	0.027143	0.733209	0.4651
X2	-9.86E-05	0.000122	-0.805874	0.4222
X3	-0.000259	0.000930	-0.278765	0.7810

Sumber: Eviews 12, 2024

Berdasarkan hasil pengujian diatas, diketahui nilai probabilitas variabel pengangguran (X1) sebesar 0,4651, variabel ketimpangan pendapatan (X2) sebesar 0,4222, dan variabel IPM (X3) sebesar 0,7810. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen penelitian ini terhindar dari gejala heteroskedastisitas, karena nilai probabilitas lebih besar dari α (0,05).

d. Uji Autokorelasi

Tabel 4. 8 Hasil Uji Autokorelasi

Root MSE	0.522680	R-squared	0.795823
Mean dependent var	4.887937	Adjusted R-squared	0.885771
S.D. dependent var	1.625849	S.E. of regression	0.549501
Akaike info criterion	1.730782	Sum squared resid	34.42251
Schwarz criterion	2.000904	Log likelihood	-97.03927
Hannan-Quinn	1.840524	F-statistic	89.11732

criter.

Durbin-Watson stat	2.331363	Prob(F-statistic)	0.000000
--------------------	----------	-------------------	----------

Sumber: Eviews 12, 2024

Berdasarkan hasil pengujian diatas diketahui nilai durbin watson sebesar 2,331363, selanjutnya nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel durbin watson pada signifikansi 5%. Dengan nilai sampel (T) sebesar 126 dan variabel independen (k) yaitu 3, nilai batas bawah (dL) 1,6608 dan nilai batas atas (dU) 1,7582. Maka $4 - dU \leq d \leq (4 - dL)$. $4 - 1,7582 \leq 2,431363 \leq (4 - 1,6608)$. $2,2418 \leq 2,331363 \leq 2,3392$. Artinya tidak terdapat autokorelasi.

4. Hasil Uji Statistik

a. Uji F (Simultan)

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen memiliki pengaruh atau tidak secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil regresi Probabilitas F-(Statistik) sebesar 0,000000, yang artinya lebih kecil dari nilai α (0,05). Maka pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan IPM berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010 – 2023.

b. Uji t (Parsial)

Berdasarkan hasil uji t menyatakan bahwa pengangguran memiliki probabilitas sebesar 0,0293 atau lebih kecil dari nilai α (0,05) dan memiliki koefisien positif, artinya pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Ketimpangan pendapatan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,3950 atau lebih besar dari nilai α

(0,05) dan memiliki koefisien negatif, artinya ketimpangan pendapatan yang diukur berdasarkan gini rasio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. IPM memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0045 atau lebih kecil dari nilai α (0,05) dan memiliki koefisien negatif, artinya IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil pengujian, nilai R-Square sebesar 0,795823 yang berarti pada model regresi ini pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan IPM dapat menjelaskan variasi kemiskinan sebesar 79 persen. Sedangkan 21 persen variasi kemiskinan dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian ini.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti ketika terdapat peningkatan pengangguran maka dapat meningkatkan jumlah kemiskinan. Sebaliknya ketika pengangguran mengalami penurunan maka dapat menurunkan jumlah kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010 hingga 2023. Berdasarkan data pengangguran di Provinsi Bali pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 5,63 persen dan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar

5,37 persen⁹³. Hal tersebut dibarengi dengan peningkatan persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 menjadi sebesar 4,53 persen bahkan pada tahun 2022 naik menjadi 4,57 persen. Pengangguran berdampak langsung terhadap kemiskinan, apabila pengangguran tinggi akan mendorong peningkatan angka kemiskinan. Pengangguran yang tinggi di Provinsi Bali diakibatkan oleh pandemi Covid-19 pada tahun 2020.⁹⁴

Perekonomian Provinsi Bali yang sebagian besar bergantung pada sektor pariwisata sangat berdampak besar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) banyaknya wisatawan mancanegara ke Bali pada tahun 2019 yaitu sebesar 6.275.210, pada tahun 2020 menjadi jumlah kunjungan wisatawan asing terbanyak sejak tahun 1969. Pada tahun 2020 berkurang menjadi sebesar 1.069.473 dan tahun 2021 hanya menjadi 51⁹⁵. Penutupan Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Penutupan bandara internasional berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat Bali yang banyak bergantung pada sektor pariwisata. Selain itu, banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor pariwisata juga mengalami kerugian yang sangat besar, seperti transportasi (taksi, rental mobil dan motor, ojek), pemandu wisata, dan industri kreatif. Penutupan bandara juga

⁹³ “Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali 2010 – 2023,” Badan Pusat Statistik, diakses pada 12 November 2024.

⁹⁴ “Dampak Pandemi Covid-19 Provinsi Bali,” Badan Pusat Statistik, diakses 10 Oktober 2024, <https://www.nusabali.com>.

⁹⁵ Badan Pusat Statistik. *Data Wisatawan Mancanegara Ke Bali*, Provinsi Bali: BPS, 2024.

menyebabkan angka pengangguran meningkat. Banyak masyarakat yang sebelumnya bekerja di hotel, restoran, agen perjalanan kehilangan pekerjaannya, dan sektor ekonomi lainnya di Bali tidak mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Akibat dari pandemi Covid-19 menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, sehingga menurunkan pendapatan rumah tangga. Pendapatan yang menurun juga menyebabkan turunnya daya beli masyarakat Bali.⁹⁶

Penelitian ini sesuai dengan Teori David Ricardo yang mengatakan bahwa pengangguran dapat terjadi akibat kekakuan dalam struktur pasar tenaga kerja. Menurutnya, apabila upah yang ditetapkan diatas tingkat keseimbangan pasar, maka akan terdapat surplus tenaga kerja dan menyebabkan pengangguran⁹⁷.

Dan sesuai dengan penelitian oleh Tasya Putri Indra Pranizty, Yustirania Septiani yang mengatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka dengan tingkat kemiskinan memiliki pergerakan yang sama. Dimana, penurunan pada tingkat pengangguran terbuka akan membuat tingkat kemiskinan juga menurun. Penurunan ini disebabkan oleh semakin bertambahnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia, sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang ada sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan⁹⁸.

⁹⁶ “UMKM,” Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), diakses 10 Oktober 2024, <https://www.kemenparekraf.go.id>

⁹⁷ David Ricardo, *On the Principles of Political Economy and Taxation* (London: John Muray, 1817): 23.

⁹⁸ Tasya Putri Indra Pranizty dan Yustirania Septiani, “Determinasi Tingkat Kemiskinan Provinsi Indonesia 2016-2020” *Jurnal EKOMBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 7, No.2 (2021):12.

Namun tidak sesuai dengan penelitian Fivien Muslihatinningsih dan Jainal Abidin yang mengatakan bahwa, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Pengangguran dan kemiskinan memiliki hubungan yang sangat erat, jika suatu masyarakat memiliki pekerjaan maka masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhannya, namun jika di dalam masyarakat masih ada yang menganggur, secara otomatis akan mengurangi kesejahteraan suatu masyarakat dan akan memengaruhi tingkat kemiskinan⁹⁹.

Islam juga menganjurkan bahwa setiap manusia diwajibkan untuk bekerja dan mengingkari semua kemalasan, sesuai dengan Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat (10) :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”¹⁰⁰

Perintah ayat diatas menunjukkan bahwa mencari rezeki adalah bagian dari ibadah dan sarana untuk memperoleh keberuntungan. Islam sangat melarang seseorang untuk menjadi pengangguran. Pengangguran adalah masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang tidak termanfaatkan, yang dapat disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja atau rendahnya kualitas sumber daya manusia. Islam juga menganjurkan bahwa setiap manusia diwajibkan untuk bekerja dan mengingkari semua kemalasan, sesuai dengan Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat (10) :

⁹⁹ Fivien Muslihatinningsih dan Jainal Abidin, “Analisi Kemiskinan Provinsi Jawa Timur,” *JEK: Jurnal Ekonomi Ekuilibrium* 4, No.2(2020):12

¹⁰⁰ Qur'an Kementerian Agama, diakses pada tanggal 22 Desember 2024, Pukul 13.00 WIB. <https://quran.kemenag.go.id/>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”¹⁰¹

Perintah ayat diatas menunjukkan bahwa mencari rezeki adalah bagian dari ibadah dan sarana untuk memperoleh keberuntungan. Islam sangat melarang seseorang untuk menjadi pengangguran. Pengangguran adalah masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang tidak termanfaatkan, yang dapat disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja atau rendahnya kualitas sumber daya manusia.

2. Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti apabila ketimpangan pendapatan menurun maka tidak dapat meningkatkan jumlah kemiskinan, sebaliknya apabila ketimpangan pendapatan mengalami kenaikan maka tidak dapat menurunkan jumlah kemiskinan di Provinsi Bali pada tahun 2010 hingga 2023. Menurut data PDRB atas dasar harga konstan 2010 Provinsi Bali, pada tahun 2023 Kota Denpasar memiliki jumlah PDRB sebesar 36.004,30 milyar rupiah, dan yang paling besar diantara kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kabupaten Badung memiliki jumlah PDRB sebesar 35.554,32 milyar rupiah,

¹⁰¹ Qur'an Kementerian Agama, diakses pada tanggal 22 Desember 2024, Pukul 13.00 WIB. <https://quran.kemenag.go.id/>

Kabupaten Buleleng memiliki jumlah PDRB sebesar 23.231,43 milyar rupiah. Ketiga daerah tersebut memiliki jumlah PDRB yang besar di Provinsi Bali, sedangkan Kabupaten Bangli menjadi daerah yang memiliki PDRB paling kecil di Provinsi Bali, yang hanya sebesar 4.665,10 milyar rupiah¹⁰². Ketidakmerataan PDRB di kabupaten/kota Provinsi Bali disebabkan oleh perekonomian yang hanya berpusat di wilayah Bali Selatan seperti Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, sehingga wilayah lainnya lebih tertinggal.

Namun berdasarkan data persentase jumlah penduduk miskin Provinsi Bali pada tahun 2023, Kabupaten Karangasem memiliki persentase jumlah penduduk miskin paling tinggi yakni sebesar 6,56 persen. Sedangkan Kabupaten Bangli yang memiliki jumlah PDRB paling kecil, memiliki persentase jumlah penduduk miskin sebesar 5,28 persen. Kabupaten Buleleng menjadi salah satu daerah yang memiliki jumlah PDRB terbesar dan memiliki persentase jumlah penduduk miskin yang tinggi yakni sebesar 5,85 persen¹⁰³. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan tidak dapat memengaruhi besar kecilnya jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali. Namun ketimpangan pendapatan dapat memperburuk kualitas hidup bagi sebagian besar penduduk terhadap akses layanan dasar dan peluang untuk memperbaiki kesejahteraan. Ketimpangan pendapatan yang tinggi tetap dapat menjadi permasalahan

¹⁰² “Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010,” Badan Pusat Statistik, diakses pada 12 Oktober 2024.

¹⁰³ “Persentase Jumlah Penduduk Miskin,” Badan Pusat Statistik, diakses pada 12 Oktober 2024.

untuk memperburuk ketidaksetaraan sosial dan meningkatkan kerentanan bagi masyarakat yang tidak terlayani dengan baik oleh pertumbuhan ekonomi yang ada.

Penelitian ini sesuai dengan Teori Simon Kuznet yang berpendapat bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat sebelum akhirnya menurun ketika negara mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi¹⁰⁴. Dan sesuai dengan penelitian Vania Grace Sianturi, M. Syafii, Ahmad Albar Tanjung yang mengatakan bahwa penurunan kemiskinan tidak selalu diiringi dengan penurunan ketimpangan pendapatan¹⁰⁵. Tidak sesuai dengan penelitian Muhammad Farhan dan Sugianto yang mengatakan bahwa kemiskinan terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan minimum, ketika kemiskinan berkurang hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mampu memenuhi kebutuhan minimumnya. Kebutuhan minimum terpenuhi disebabkan pendapatan yang mereka peroleh semakin meningkat. Meningkatnya pendapatan masyarakat akan memperkecil perbedaan pendapatan yang diperoleh, sehingga ketimpangan pendapatan menurun¹⁰⁶.

Islam sangat menekankan pentingnya keadilan sosial dan redistribusi kekayaan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

¹⁰⁴ Simon Kuznets, "Economic Growth and Income Inequality," *The American Economic Review* XLV, No.1 (1955): 22.

¹⁰⁵ Vania Grace Sianturi, M. Syafii, dan Ahmad Albar Tanjung, "Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus 2016-2019," *Jurnal Samudra Ekonomikam* 5, No.2 (2021): 126

¹⁰⁶ Muhammad Farhan dan Sugianto, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa," *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi Budaya, Teknologi dan Pendidikan* 1, No.4 (2022): 245.

Dalam konteks Bali, yang sebagian besar bergantung pada sektor pariwisata, ketimpangan yang tinggi dapat berakibat pada tingginya angka kemiskinan, terutama di kalangan masyarakat yang bekerja di sektor yang terdampak pandemi sesuai dengan Surah Al- Baqarah (177):

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan ekonomi untuk memastikan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh umat.

3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti apabila penurunan IPM maka dapat meningkatkan jumlah kemiskinan, sebaliknya apabila

peningkatan IPM maka dapat menurunkan jumlah kemiskinan di Provinsi Bali pada tahun 2010 hingga 2023. Pembangunan IPM sangat berperan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Provinsi Bali. Menurut data IPM Provinsi Bali, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan tingginya kualitas hidup masyarakat Bali. Peningkatan kesejahteraan di Bali disebabkan oleh sektor pariwisata yang memainkan peran besar dalam perekonomian, program pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dalam sektor-sektor seperti perhotelan dan pariwisata sangat membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Berdasarkan data IPM Kota Denpasar tahun 2023 sebesar 84,73, Kabupaten Badung sebesar 83,08, Kabupaten Gianyar sebesar 79,24, dan Kabupaten Bangli menjadi daerah dengan IPM terendah di Provinsi Bali yakni sebesar 68,91. Pada Kota Denpasar dan Kabupaten Badung tercatat memiliki IPM berkategori “sangat tinggi”, sedangkan enam kabupaten berkategori “tinggi”, dan satu kabupaten berkategori “sedang”¹⁰⁷.

Penelitian ini sesuai dengan Ida dan Aji Prakoso yang mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengklasifikasikan negara sebagai negara maju, berkembang, atau terbelakang, serta untuk mengevaluasi keberhasilan program sosial dan ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat¹⁰⁸. Sesuai dengan penelitian Fivien Muslihatinningsih dan

¹⁰⁷ “Data IPM Kabupaten/Kota Provinsi Bali,” Badan Pusat Statistik, diakses 12 Oktober 2024.

¹⁰⁸ Ida Syafa’atur Rohmah dan Jalu Aji Prakoso, “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap

Jainal Abidin yang mengatakan bahwa upaya penurunan tingkat kemiskinan harus dilakukan secara beriringan dengan upaya peningkatan pembangunan manusia karena kapasitas manusia merupakan faktor penentu kemampuan seseorang untuk membebaskan diri dari perangkap kemiskinan¹⁰⁹. Namun tidak sesuai dengan penelitian Iqbal, Maisyuri, Fauzan, Shalawati, dkk yang mengatakan bahwa IPM diindikasikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Meskipun ekonomi tumbuh dan menghasilkan sumber daya, namun sumber daya tersebut tidak dapat digunakan untuk meningkatkan indikator lain. Selain itu, struktur dan proses sosial tidak memberikan manfaat bagi penurunan tingkat kemiskinan¹¹⁰.

Dalam perspektif ekonomi Islam, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga sangat penting karena mencerminkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Surah Ar-Ra'd ayat (11):

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

هُرْلَهُ مُعَقَّبَتْ مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ
وَالِلَّ مُعَقَّبَتْ مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِمَّا

Artinya:“ Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah

Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat,” *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 2, No.6 (2022): 66 <<https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.294>>.

¹⁰⁹ Fivien Muslihatiningsih dan Jainal Abidin, “Analisi Kemiskinan Provinsi Jawa Timur,” *JEK: Jurnal Ekonomi Ekuilibrium* 4 No.2(2020): 30.

¹¹⁰ Muttaqien, dkk., “Determinasi Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/ Kota Di Provinsi Aceh,” *Jurnal JEMT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi* 7, No.3 (2023): 764.

menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain dia¹¹¹

Dalam kandungan ayat ini menegaskan bahwa perubahan dalam kehidupan manusia termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan bergantung pada upaya individu dan masyarakat dalam memperbaiki kualitas hidup mereka. Dalam konteks ekonomi Islam, IPM mencakup tiga aspek utama yakni pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Ketiga aspek ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat berkembang secara holistik, yang juga menjadi tujuan utama dalam pembangunan ekonomi Islam.¹¹²

4. Pengaruh Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan IPM secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali pada tahun 2010 hingga 2023. Pengangguran merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kemiskinan. Apabila pengangguran tinggi, maka banyak masyarakat yang tidak mempunyai pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka. Kondisi tersebut dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin, karena mereka tidak memiliki sumber daya untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, atau bahkan kebutuhan primer. Menurut

¹¹¹ Qur'an Kemenag, diakses pada tanggal 10 Oktober 2014, Pukul 12.40 WIB. <https://quran.kemenag.go.id/>

¹¹² Muhammad Hakim Sitompul, Azhari Akmal Trigan, dan Muhammad Syukri Albani Nasution, "Integrasi Preferensi Manusia Dalam Pengembangan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm): Perspektif Surat Ar Ra'D Ayat 11," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, No.1 (2024), 374–373. <<https://www.doi.org/10.30651/jms.v9i1.21466>>.

data banyaknya pengangguran di Provinsi Bali tahun 2022 sebanyak 131.469 jiwa dan tahun 2023 sebanyak 72.421 jiwa¹¹³. Jumlah pengangguran mengalami penurunan yang sangat besar. Hal tersebut karena pemulihan perekonomian yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Meskipun jumlah pengangguran mengalami penurunan, tetap pentingnya untuk melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan.

Ketimpangan pendapatan yang merujuk pada distribusi pendapatan yang tidak merata pada masyarakat. Ketika ketimpangan pendapatan yang tinggi, maka sebagian besar kekayaan terpusat pada segelintir orang. Sementara itu, banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi sangat terbatas. Hal tersebut dapat memperburuk kemiskinan, karena individu kelas bawah akan semakin sulit untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Menurut data gini rasio menurut kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2023. Kabupaten Tabanan memiliki gini rasio senilai 0,3470, Kota Denpasar senilai 0,3420, dan Kabupaten Klungkung senilai 0,3380. Dari data tersebut diartikan bahwa ketidakmerataan pendapatan yang diterima oleh setiap individu sangat tinggi pada tiga daerah tersebut. Namun pada Kabupaten Bangli memiliki gini rasio senilai 0,2820 dan Kabupaten Badung senilai 0,2800. Kedua daerah tersebut memiliki gini rasio paling sedikit di antara daerah lainnya di Provinsi Bali¹¹⁴.

¹¹³ "Banyaknya Pengangguran Provinsi Bali," Badan Pusat Statistik, diakses 10 Oktober 2024.

¹¹⁴ "Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota," Badan Pusat Statistik, diakses pada 10 Oktober 2024.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan pada suatu negara, berdasarkan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Semakin tinggi IPM suatu daerah maka semakin baik kualitas hidup masyarakat. Artinya lebih sedikit masyarakat yang terperangkap dalam kemiskinan. Menurut data IPM di Provinsi Bali tahun 2022 sebesar 76,44 poin, tahun 2023 sebesar 77,10 poin¹¹⁵. Peningkatan IPM diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan, sebab IPM yang rendah mencerminkan kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan. Rendahnya peluang kerja dan tingkat pendapatan yang rendah dapat meningkatkan kemungkinan masyarakat terjebak dalam kemiskinan.

Pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan IPM mempunyai hubungan dengan kemiskinan. Pengangguran menyebabkan hilangnya sumber pendapatan, ketimpangan pendapatan memperburuk pemerataan distribusi kesejahteraan, dan IPM rendah mencerminkan terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Semua faktor tersebut saling memengaruhi dan dapat memperburuk kemiskinan di Provinsi Bali. Pengangguran yang tinggi dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan, sementara ketimpangan pendapatan menghambat akses pendidikan dan kesehatan, sehingga dapat memperburuk pengangguran dan meningkatkan kemiskinan. IPM yang rendah dapat memperburuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, meningkatkan ketimpangan pendapatan, serta tingkat

¹¹⁵ "Data IPM Provinsi Bali," Badan Pusat Statistik, diakses pada 10 Oktober 2024.

pengangguran. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Rekha Alfionika, Yulmardi, Hardiani yang mengatakan bahwa berdasarkan hasil regresi data panel dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, dan TPAK secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi¹¹⁶.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan dan penurunan kemiskinan merupakan hasil dari sinergi antara pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, dan kesempatan kerja yang memadai. Ketiga indikator ini saling terkait dan harus dicapai dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu keadilan sosial, tanggung jawab, dan distribusi kekayaan yang merata. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan dalam ekonomi Islam tidak hanya menekankan pada pemerataan distribusi pendapatan, peningkatan kualitas hidup masyarakat yang diwujudkan melalui peningkatan IPM dan pengurangan angka pengangguran. Dengan ketiganya berjalan seiring, tujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh dan memenuhi prinsip-prinsip syariah dapat terwujud, sehingga kemiskinan dapat ditekan secara signifikan.¹¹⁷

¹¹⁶ Rekha Alfionika, Yulmardi, dan Hardiani, "Analisis Determinasi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi," *Jurnal Ekonomi Dan Sumberdaya Lingkungan* 10, No.1(2021): 48.

¹¹⁷ Bulgis Khumairoh, "Analisis Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia Tbk. melalui Pendekatan Economic Value Added (EVA) Tahun, 2017-2021."(Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 34.

BAB V

SARAN DAN PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dari bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari analisis regresi data panel diketahui bahwa variabel pengangguran yang dihitung berdasarkan data tingkat pengangguran terbuka memiliki nilai probabilitas 0,0293 atau kurang dari nilai α (0,05) dan memiliki koefisien positif. Artinya pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali pada tahun 2010 hingga 2023. Apabila peningkatan pengangguran dapat mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali. Tingginya angka pengangguran akan menyebabkan peningkatan jumlah kemiskinan.
2. Dari analisis regresi data panel diketahui bahwa variabel ketimpangan pendapatan yang dihitung berdasarkan data gini rasio memiliki nilai probabilitas sebesar 0,3950 atau lebih besar dari nilai α (0,05) dan memiliki koefisien negatif. Artinya ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali pada tahun 2010 hingga 2023. Apabila jumlah ketimpangan pendapatan mengalami penurunan, maka tidak dapat mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali. Karena kemiskinan dapat teratasi tanpa mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat.

3. Dari analisis regresi data panel diketahui bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0045 atau lebih kecil dari nilai α (0,05) dan memiliki koefisien negatif. Artinya IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali pada tahun 2010 hingga 2023. Apabila peningkatan nilai IPM maka dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali. Ketika masyarakat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan hidup.
4. Dari analisis regresi data panel diketahui bahwa berdasarkan uji F (simultan) nilai Probabilitas F-(Statistik) sebesar 0,000000 atau lebih kecil dari α (0,05). Artinya variabel pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali pada tahun 2010 hingga 2023.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah peneliti uraikan, sehingga dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Tingginya angka pengangguran terjadi karena ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Pada Provinsi Bali yang bergantung pada sektor pariwisata, sehingga diperlukan diversifikasi sektor ekonomi untuk membuka lapangan usaha yang baru seperti pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta industri kreatif dan ekonomi digital.

2. Mengatasi ketimpangan pendapatan di Provinsi Bali diperlukan kebijakan yang mengedepankan pemerataan kesempatan ekonomi dan pembangunan bagi semua daerah. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan, pengembangan infrastruktur yang merata, serta pemberdayaan UMKM dan sektor ekonomi berbasis lokal akan memainkan peran kunci dalam mengurangi permasalahan ketimpangan.
3. Meningkatkan IPM di Provinsi Bali akan mendorong kualitas hidup yang lebih baik, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas. Kebijakan yang dapat diterapkan yaitu peningkatan akses kualitas layanan kesehatan. Memperbaiki sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan seperti memberikan fasilitas pendidikan yang merata dan program beasiswa, serta memberikan pelatihan keterampilan kerja. Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk semua wilayah di Provinsi Bali. Dengan beberapa kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mengurangi jumlah kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- “Data Wisatawan Mancanegara Ke Bali,” Badan Pusat Statistik Bali, diakses pada 12 November 2024, [Statistik Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Bali 2023 - Badan Pusat Statistik Provinsi Bali](#)
- “Gini Rasio Provinsi Bali 2010 – 2023,” Badan Pusat Statistik Bali, diakses pada 12 November 2024, [Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Bali](#)
- “Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali 2010 – 2023,” Badan Pusat Statistik Bali, diakses pada 12 November 2024, [Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Bali](#)
- “Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Bali 2010 – 2023,” Badan Pusat Statistik Bali, diakses pada 12 November 2024, [Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha 2019-2023 - Badan Pusat Statistik Provinsi Bali](#)
- “Letak Geografis Pulau Bali,” Tata Ruang Provinsi Bali, diakses pada 12 November 2024, <https://tarubali.baliprov.go.id/sekilas-bali/>
- “PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Bali 2020 – 2023,” Badan Pusat Statistik Bali, diakses pada 12 November 2024, [PDRB Tahunan Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Bali](#)
- “Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali 2010 – 2023,” Badan Pusat Statistik Bali, diakses pada 12 November 2024, [Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Bali](#)
- “Persentase Penduduk Miskin,” Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, diakses 19 Agustus, 2024, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics>.
- “Peta Provinsi Bali,” Bali Convention Center,” diakses pada 10 November 2024, <https://baliconventioncenter.com/wp-content/uploads/2019/05/bali-map.pdf>
- “Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali 2010 – 2023,” Badan Pusat Statistik Bali, diakses pada 12 November 2024, [Persentase Pengangguran Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Bali](#)

“Usaha Mikro Kecil dan Menengah,” Kegiatan Mikro Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), diakses 10 Oktober 2024, <https://www.kemenparekraf.go.id>

El Adawiyah, Sa'diyah, “Kemiskinan dan Faktor-Faktor Penyebabnya”, *KHIDMAT SOSIAL, Journal of Social Work and Social Service* 1, No.1 (2020): 43-56. [6336-15452-1-SM.pdf](https://doi.org/10.24054/khidmat-sosial.v1i1.6336-15452-1-SM.pdf)

Alfath, Suharto, “Determinasi kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan* 2, No.2, (2023): 145-167. [Determinan kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan](https://doi.org/10.24054/jke.v2i2.145-167)

Alfionika, Rekha, Yulmardi, dan Hardiani, “Analisis Determinasi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi”, *Jurnal Ekonomi dan Sumberdaya Lingkungan* 10, No.1, (2021): 47-58. [Analisis determinasi tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jambi | e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan](https://doi.org/10.24054/jes.v10i1.47-58)

Ahmad, Younis Ali, Biaban N. Rostam, dan Burhan A. Mohammad, “The Effect of the Financial Crisis on Macroeconomic Variables in Iraq, Iran, and Turkey,” *Economic Journal of Emerging Markets* XII, No.1 (2020): 54-66. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol12.iss1.art5>.

Mirahma, Aliyah Asiyah, Msy.Aziza Septiani, dan Maya Panorama, “Determinasi Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Selatan Tahun 2019-2022,” *Jurnal JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* XIII, No.1 (2023): 144- 156. [PDF Determinasi Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan Tahun 2019-2022](https://doi.org/10.24054/jesi.v13i1.144-156)

Amar, Syamsul, “Determination of Poverty, Unemployment, Economic Growth, and Investment in West Sumatra Province,” *International Journal of Sustainable Development & Planning* 17, No.4 (2022): 1239-1249. [Determination of Poverty, Unemployment, Economic Growth, and Investment in West Sumatra Province | Request PDF](https://doi.org/10.24054/ijsdp.v17i4.1239-1249)

Anggraini, Dini, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto, “Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Tirtayasa Ekonomika* 18, No.1 (2023):123-135. <https://doi.org/10.35448/jte.v18i1.13613>.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: BPS, 2023.

. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Caesarisma, Evanty, dan Hamrullah, "Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2017-2021" *JEDS: Jurnal Ekonomi dan Dinamika Sosial* 2, No.2 (2023): 85-96. [Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2017-2021 | Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial](#)

Farhan, Muhammad, dan Sugianto, "Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa", *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi Budaya, Teknologi dan Pendidikan* 1, No.4 (2022): 243-254. [ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PULAU JAWA | Semantic Scholar](#)

Firdaus, Adhityas, Taufiq C. Dawood, and Muhammad Abrar. "Determinants of Poverty in Indonesia: An Empirical Evidence using Panel Data Regression," *International Journal of Global Operations Research* 2, no.4 (2021): 124-132. <https://doi.org/10.47194/ijgor.v2i4.90>.

Frank, Andre Gunder. *Capitalism and Underdevelopment in Latin America: Historical Studies of Chile and Brazil*. New York: Monthly Review Press, 1967.

Hakim, Lukman dan Ahmad Danu Syaputra, "Al-Qur'an Dan Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, No.3 (2020): 629-637. <<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1310>>.

Iqbal, Maisyuri, Fauzan, Shalawati, Ulfi Rahmi, dan Eliza Nopita, "Determinasi Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh," *Jurnal JEMT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)*7, No.3,(2023): 764-772. [24-+Muttaqien \(1\).pdf](#)

Iqbal, Muhammad, "Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 13, No.1 (2017): 68-72. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/57>

Kadji, Yulianto, "Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya," *Academia.edu*. 14 Agustus 2024.

https://www.academia.edu/39167564/KEMISKINAN_DAN_KONSEP_T EORITISNYA_Oleh_Yulianto_Kadji

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Semarang: Toha Putra, 1989.

Khumairoh, Bulgis, "[Analisis Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia Tbk. melalui Pendekatan Economic Value Added \(EVA\) Tahun, 2017-2021.](#)" Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023. [BULGIS KHUMAIROH_E20191012.pdf](#)

Kusuma, Bayu Wijaya, dan Anik Sri Widawati, "Analisis Determinasi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh," *Jurnal JIMEA: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi* 8 No.1 (2024): 34-41. [\(PDF\) ANALISIS DETERMINASI TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH](#)

Kusumaningrum, Haning Dwiyantri, "Poverty during Covid-19 Pandemic in Indonesia: A Case Study in Java-Bali Region," *Jurnal Kawistara* 11, No.3 (2021): 240-253. [\(PDF\) Poverty during Covid-19 Pandemic in Indonesia: A Case Study in Java-Bali Region](#)

Kuznets, Simon, "Economic Growth and Income Inequality." *The American Economic Review* XLV, No.1 (1955): 2-53. [Economic Growth and Income Inequality](#)

Lewis, Oscar, "The Culture of Poverty," *Scientific American* 215, No. 4 (October 1966): 19-25. [Lewis \(1966\).pdf](#)

Marini, Lisa, dan Novi Tri Putri, "Peluang Terjadinya Pengangguran Di Provinsi Bengkulu : Seberapa Besar", *Convergence: The Journal of Economic Development* 1, No. 2 (2020): 76-85 <<https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v1i2.10900>>.

Marisa, "Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia," *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 2, No.1, (2019): 79-87. [1156-5312-1-PB.pdf](#)

Muhith, Abdul, Rachmad Bitulah, dan Amirul Wahid. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bildung, 2020.

Muslihatiningsih, Fivien, dan Jainal Abidin, "Analisis Kemiskinan Provinsi Jawa Timur," *JEK: Jurnal Ekonomi Ekuilibrium* 4 No.2 (2020):29-39. [\(PDF\) Analisis Kemiskinan Provinsi Jawa Timur](#)

- Fanezya, Naura Adir, "Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi di Daerah Istimewa Yogyakarta" (Skripsi, Universitas Jember, 2019).
- Pranizty, Indra, Tasya Putri, dan Yustirania Septiani, "Determinasi Tingkat Kemiskinan Provinsi Indonesia 2016-2020" *Jurnal EKOMBIS: Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis* 7, No.2 (2021):121-132. <http://jurnal.utu.ac.id/ekombis/article/view/3536/0>
- Priadana, Sidik, dan Denok Sunarsi. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Tangerang: Pascal book, 2021.
- Proyono, B. Hery. "Amartya Sen Membongkar Rasionalitas," *Jurnal DISKURSUS* 14, No.14, (2015): 38-79. <https://journal.driyarkara.ac.id/index.php/diskursus/article/view/62/38>
- Qur'an Kementerian Agama, diakses pada tanggal 22 Desember 2024, Pukul 11.49, <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Ricardo, David. *On the Principles of Political Economy and Taxation*. London: John Murray, 1817.
- Ridlo, Ali, "Persoalan Pengangguran Dan Kewajiban Kerja Menurut AL Syaibani", *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, No.1 (2022): 1-14. [186-Article Text-788-1-10-20220127 \(1\).pdf](https://doi.org/10.24054/quranomic.v1i1.186-187)
- Rohmah, Ida Syafa'atur dan Jalu Aji Prakoso, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Rata-rata Lama Sekolah, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pengeluaran Perkapita terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat," *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan* 2, No. 6 (2022): 255–266 <<https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.294>>.
- Rostow, W. W, "The Stages of Economic Growth," *The Economic History Review* XII, No.1 (1959): 14.
- Sayifullah, dan Tia Ratu Gandasari, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten", *Jurnal Ekonomi-Qu* 6, No.2 (2016): 236. <<https://doi.org/10.35448/jequ.v6i2.4345>>.
- Sen, Amartya. *On Economic Inequality*. Oxford: Clarendon Press, 1973. [file:///D:/LITERATUR%20SIDANG%20PIAA/fotnot%2026%20\(e-boks%20\).pdf](file:///D:/LITERATUR%20SIDANG%20PIAA/fotnot%2026%20(e-boks%20).pdf)

- Sianturi, Vania Grace, M. Syafii, dan Ahmad Albar Tanjung, "Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus 2016-2019," *Jurnal Samudra Ekonomika* 5, No.2 (2021):126-133. <https://doi.org/10.33059/jse.v5i2.4270>.
- Subrata, Bakhtiar Al Yunussy, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur" (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018),45.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sujarweni, V. Wiranata. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.
- Sukirno, Sadono. *Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sutikno, Eddy Setiadi Soedjono, Agnes Tuti Rumiati, dan Lantip Trisurno, "Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan Sistem," *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* 11, no.1 (2010):135-149. <https://doi.org/10.23917/jep.v11i1.339>.
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN KHAS Jember*. Jember: Penerbit UIN KHAS Jember, 2021.
- Wulandari, Sari, Ahmad Prayendi Dasopang, Idzni Hasfizetty, Muhammad Yunus Sofian, dkk., "Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah Dalam Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Inovasi Penelitian (JIP)* 2, No.10 (2022): 3211-3222.
- Yuendini, Emi Puspita, Ismi Nurafifa Rachmi, Novanda Nurul, dan Rika Harini, "Analisis Potensi Ekonomi Sektor Pertanian dan Sektor Pariwisata di Provinsi Bali Menggunakan Teknik Analisis Regional," *Jurnal Geografi* 16, No.2 (2019): 128–136. <https://doi.org/10.15294/jg.v16i2.20831>
- Zahriyah, Aminatus, Suprianik, Agung Parmono, dan Mustofa. *Ekonometrika Teknik dan Aplikasi dengan SPSS*. Jember: Mandala Press, 2021.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Matriks Penelitian
- Lampiran 2 : Pernyataan Surat Keaslian Tulisan
- Lampiran 3 : Jurnal Kegiatan Penelitian
- Lampiran 4 : Hasil Analisis Data
- Lampiran 5 : Data Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai Bimbingan
- Lampiran 9 : Surat Lulus Plagiasi
- Lampiran 10 : Biodata Penulis

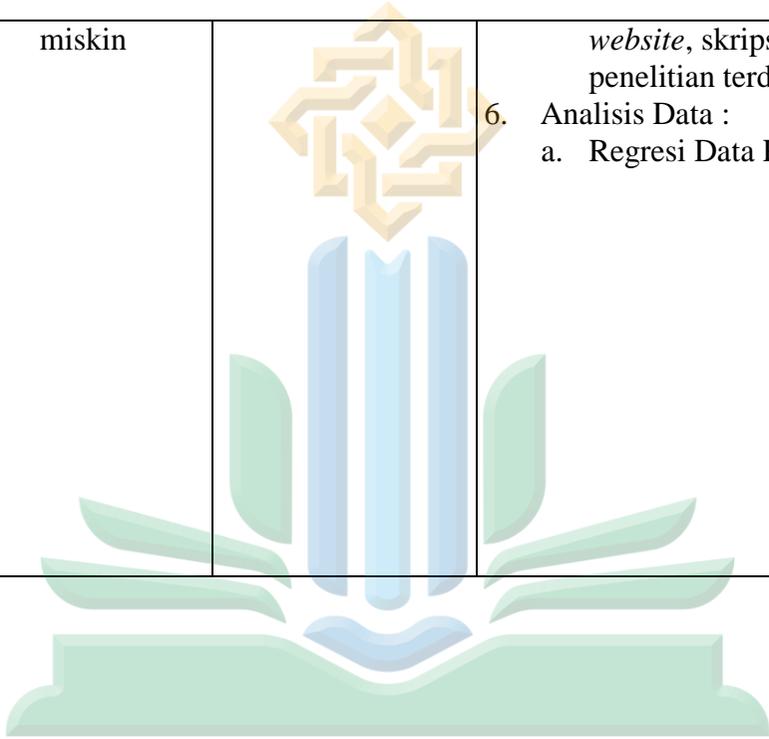


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1 : Matriks Penelitian

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel Penelitian	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Rumusan Masalah
Determinasi Kemiskinan Di Provinsi Bali Tahun 2010-2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangguran (X1) 2. Ketimpangan Pendapatan (X2) 3. Indeks Pembangunan Manusia (X3) 4. Kemiskinan (Y) 	<p>Indikator Pengangguran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) <p>Indikator Ketimpangan Pendapatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Rasio Gini <p>Indikator IPM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Indeks Pembangunan Manusia <p>Indikator Kemiskinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Jumlah penduduk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Sekunder: BPS Provinsi Bali dari Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan Tahun 2010-2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Penelitian: Kuantitatif 2. Jenis Penelitian: Kuantitatif Deskriptif 3. Variabel Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Variabel Terikat (Y) <ol style="list-style-type: none"> 1) Kemiskinan b. Variabel Bebas (X) <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengangguran 2) Ketimpangan Pendapatan 3) Indeks Pembangunan Manusia 4. Jenis dan Sumber Data: Sekunder, <i>Time Series</i> 5. Teknik Pengumpulan Data <ol style="list-style-type: none"> a. Data sekunder BPS yang diolah b. Kajian Kepustakaan dari jurnal, buku, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010-2023? 2. Apakah ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010-2023? 3. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali

		miskin		<i>website</i> , skripsi, dan penelitian terdahulu 6. Analisis Data : a. Regresi Data Panel	tahun 2010-2023? 4. Apakah pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010-2023?
--	--	--------	---	---	--

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Lampiran 2 : Pernyataan Surat Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Oktavia
NIM : 214105020008
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan jujur bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat penjiplakan karya ilmiah, kecuali yang dikutip dalam skripsi ini dan dikutip sebagai sumber referensi.

Apabila di kemudian hari hasil karya ini benar terbukti ada unsur plagiarisme dan komplain dari pihak luar, maka saya siap diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu pernyataan ini saya buat dengan jujur dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jember, 21 November 2024

Saya yang menyatakan



Dwi Oktavia

NIM. 214105020008

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 3 : Jurnal Kegiatan Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Dwi Oktavia
Nim : 214105020008
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Determinasi Kemiskinan Di Provinsi Bali
 Tahun 2010-2023

No	Tanggal	Kegiatan
1.	26 Agustus 2024	Penyusunan Proposal Penelitian
2.	2 - 20 September 2024	Revisi Proposal Penelitian
3.	20 September 2024	ACC Seminar Proposal
4.	29 Oktober 2024	Ujian Seminar Proposal
5.	1 November 2024	Penyerahan Surat Izin Penelitian
6.	2 November 2024	Analisis Data
7.	5 - 20 November 2024	Bimbingan Skripsi
8.	21 November 2024	ACC Skripsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Lampiran 4 : Hasil Analisis Data

Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	18.031045	(8,114)	0.0000
Cross-section Chi-square	103.033138	8	0.0000

Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.098631	3	0.0044

Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

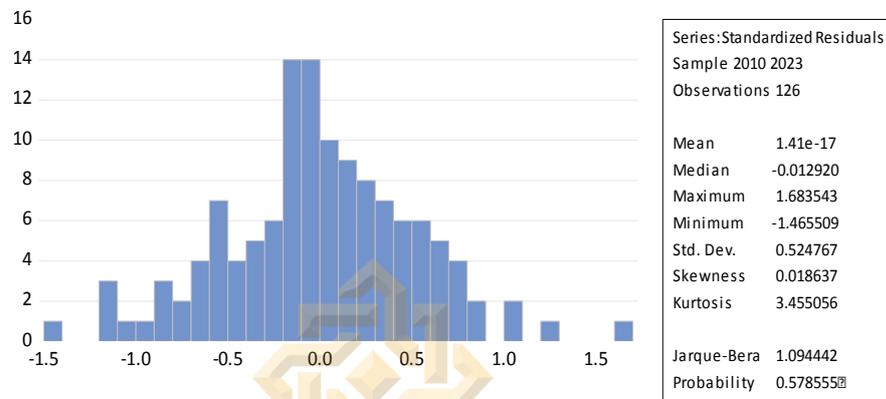
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.97735	1.755550	9.670670	0.0000
X1	1.240526	0.033532	1.208569	0.0293
X2	-0.328500	0.000157	-2.083204	0.3950
X3	-2.101526	0.000232	-6.569852	0.0045

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.522680	R-squared	0.795823
Mean dependent var	4.887937	Adjusted R-squared	0.885771
S.D. dependent var	1.625849	S.E. of regression	0.549501
Akaike info criterion	1.730782	Sum squared resid	34.42251
Schwarz criterion	2.000904	Log likelihood	-97.03927
Hannan-Quinn criter.	1.840524	F-statistic	89.11732
Durbin-Watson stat	2.331363	Prob(F-statistic)	0.000000

Hasil Uji Normalitas



Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.487491	0.379748
X2	0.487491	1.000000	0.185986
X3	0.379748	0.185986	1.000000

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.564137	6.795709	0.377317	0.7067
X1	0.019901	0.027143	0.733209	0.4651
X2	-9.86E-05	0.000122	-0.805874	0.4222
X3	-0.000259	0.000930	-0.278765	0.7810

Hasil Uji Autokorelasi

Root MSE	0.522680	R-squared	0.795823
Mean dependent var	4.887937	Adjusted R-squared	0.885771
S.D. dependent var	1.625849	S.E. of regression	0.549501
Akaike info criterion	1.730782	Sum squared resid	34.42251
Schwarz criterion	2.000904	Log likelihood	-97.03927
Hannan-Quinn criter.	1.840524	F-statistic	89.11732
Durbin-Watson stat	2.331363	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 5 : Data Penelitian

Nama Kabupaten	Tahun	Y	X1	X2	X3
Kab. Jembrana	2010	8,11	2,54	0,2575	66,70
Kab. Jembrana	2011	6,56	3,54	0,4020	68,00
Kab. Jembrana	2012	5,74	1,97	0,3706	67,94
Kab. Jembrana	2013	5,56	3,46	0,3710	68,39
Kab. Jembrana	2014	5,83	2,95	0,3863	68,67
Kab. Jembrana	2015	5,84	1,59	0,3079	69,66
Kab. Jembrana	2016	5,33	-	0,3627	70,38
Kab. Jembrana	2017	5,38	0,67	0,3170	70,72
Kab. Jembrana	2018	5,20	1,41	0,3272	71,65
Kab. Jembrana	2019	4,88	1,44	0,2903	72,35
Kab. Jembrana	2020	4,51	4,52	0,3531	72,36
Kab. Jembrana	2021	5,06	4,11	0,3170	72,75
Kab. Jembrana	2022	5,30	3,94	0,3260	73,58
Kab. Jembrana	2023	4,96	2,52	0,3260	74,04
Kab. Tabanan	2010	6,96	1,07	0,2596	70,68
Kab. Tabanan	2011	5,62	2,80	0,3648	71,00
Kab. Tabanan	2012	4,90	2,18	0,3473	71,69
Kab. Tabanan	2013	5,21	0,80	0,3862	72,31
Kab. Tabanan	2014	5,61	2,25	0,4026	72,68
Kab. Tabanan	2015	5,52	1,73	0,3557	73,54
Kab. Tabanan	2016	5,00	-	0,3444	74,19
Kab. Tabanan	2017	4,92	1,79	0,3180	74,86
Kab. Tabanan	2018	4,46	1,45	0,3249	75,45
Kab. Tabanan	2019	4,21	1,29	0,3080	76,16
Kab. Tabanan	2020	4,27	4,21	0,3239	76,17
Kab. Tabanan	2021	5,12	3,94	0,3110	76,45
Kab. Tabanan	2022	5,18	3,83	0,2990	76,75
Kab. Tabanan	2023	4,70	2,64	0,3470	77,43
Kab. Badung	2010	3,23	1,25	0,2864	75,84
Kab. Badung	2011	2,62	2,28	0,3385	77,00
Kab. Badung	2012	2,16	1,67	0,3258	77,26
Kab. Badung	2013	2,46	0,80	0,3468	77,63
Kab. Badung	2014	2,54	0,48	0,3404	77,98
Kab. Badung	2015	2,33	0,34	0,3147	78,86
Kab. Badung	2016	2,06	-	0,3151	79,80
Kab. Badung	2017	2,06	0,48	0,3190	80,54
Kab. Badung	2018	1,98	0,46	0,3392	80,87
Kab. Badung	2019	1,78	0,40	0,3244	81,59
Kab. Badung	2020	2,02	6,92	0,3167	81,60

Kab. Badung	2021	2,62	6,93	0,3320	81,63
Kab. Badung	2022	2,53	6,87	0,3160	82,13
Kab. Badung	2023	2,30	2,72	0,2800	83,08
Kab. Gianyar	2010	6,68	2,36	0,2717	71,45
Kab. Gianyar	2011	5,40	2,11	0,3279	72,00
Kab. Gianyar	2012	4,69	1,81	0,3362	73,36
Kab. Gianyar	2013	4,27	2,23	0,3254	74,00
Kab. Gianyar	2014	4,57	1,43	0,3774	74,29
Kab. Gianyar	2015	4,61	1,93	0,3249	75,03
Kab. Gianyar	2016	4,44	-	0,3049	75,70
Kab. Gianyar	2017	4,46	1,02	0,2682	76,09
Kab. Gianyar	2018	4,19	1,61	0,3050	76,71
Kab. Gianyar	2019	3,88	1,46	0,2866	77,14
Kab. Gianyar	2020	4,08	7,53	0,3171	77,36
Kab. Gianyar	2021	4,85	6,90	0,3330	77,70
Kab. Gianyar	2022	4,70	6,78	0,3070	78,39
Kab. Gianyar	2023	4,47	2,96	0,3170	79,24
Kab. Klungkung	2010	7,58	3,59	0,2857	66,01
Kab. Klungkung	2011	6,10	2,35	0,3777	67,00
Kab. Klungkung	2012	5,37	2,09	0,3473	67,64
Kab. Klungkung	2013	7,01	2,08	0,3599	68,08
Kab. Klungkung	2014	7,01	1,94	0,3543	68,30
Kab. Klungkung	2015	6,91	1,39	0,3695	68,98
Kab. Klungkung	2016	6,35	-	0,3601	69,31
Kab. Klungkung	2017	6,29	0,94	0,3714	70,13
Kab. Klungkung	2018	5,86	1,47	0,3915	70,90
Kab. Klungkung	2019	5,40	1,57	0,3847	71,71
Kab. Klungkung	2020	4,87	5,42	0,3575	71,73
Kab. Klungkung	2021	5,64	5,35	0,3460	71,75
Kab. Klungkung	2022	6,07	1,96	0,3510	72,55
Kab. Klungkung	2023	5,61	1,29	0,3380	73,11
Kab. Bangli	2010	6,41	0,65	0,2217	63,43
Kab. Bangli	2011	5,16	0,81	0,2678	64,00
Kab. Bangli	2012	4,52	0,90	0,3053	64,53
Kab. Bangli	2013	5,45	0,77	0,3073	65,47
Kab. Bangli	2014	5,86	0,87	0,3285	65,75
Kab. Bangli	2015	5,73	1,72	0,3838	66,24
Kab. Bangli	2016	5,22	-	0,3537	67,03
Kab. Bangli	2017	5,23	0,48	0,3005	68,24
Kab. Bangli	2018	4,89	0,81	0,3126	68,96
Kab. Bangli	2019	4,44	0,75	0,2744	69,35

Kab. Bangli	2020	4,19	1,86	0,2829	69,38
Kab. Bangli	2021	5,09	1,80	0,2850	69,37
Kab. Bangli	2022	5,28	0,76	0,2880	70,26
Kab. Bangli	2023	5,28	0,75	0,2820	70,79
Kab. Karangasem	2010	7,95	2,82	0,2325	60,58
Kab. Karangasem	2011	6,43	2,70	0,2916	62,00
Kab. Karangasem	2012	5,63	1,31	0,2877	62,95
Kab. Karangasem	2013	6,88	1,39	0,3293	63,70
Kab. Karangasem	2014	7,30	2,06	0,3371	64,01
Kab. Karangasem	2015	7,44	2,15	0,3089	64,68
Kab. Karangasem	2016	6,61	-	0,2930	65,23
Kab. Karangasem	2017	6,55	0,72	0,3232	65,57
Kab. Karangasem	2018	6,28	1,03	0,3393	66,49
Kab. Karangasem	2019	6,25	0,62	0,3125	67,34
Kab. Karangasem	2020	5,91	2,42	0,3268	67,35
Kab. Karangasem	2021	6,78	0,11	0,3180	67,36
Kab. Karangasem	2022	6,98	3,09	0,2970	68,28
Kab. Karangasem	2023	6,56	2,61	0,3370	68,91
Kab. Buleleng	2010	7,35	3,26	0,2557	66,98
Kab. Buleleng	2011	5,93	3,28	0,3434	68,00
Kab. Buleleng	2012	5,19	3,13	0,3330	68,29
Kab. Buleleng	2013	6,31	2,15	0,3755	68,83
Kab. Buleleng	2014	6,79	2,74	0,3931	69,19
Kab. Buleleng	2015	6,74	2,04	0,3373	70,03
Kab. Buleleng	2016	5,79	-	0,3360	70,65
Kab. Buleleng	2017	5,74	2,41	0,3086	71,11
Kab. Buleleng	2018	5,36	1,88	0,3446	71,70
Kab. Buleleng	2019	5,19	3,12	0,2847	72,30
Kab. Buleleng	2020	5,32	5,19	0,2851	72,55
Kab. Buleleng	2021	6,12	5,38	0,2820	72,56
Kab. Buleleng	2022	6,21	5,20	0,2810	73,45
Kab. Buleleng	2023	5,85	3,60	0,3140	73,97
Kota Denpasar	2010	2,21	6,57	0,2950	79,19
Kota Denpasar	2011	1,79	4,56	0,3399	80,00
Kota Denpasar	2012	1,52	2,57	0,4248	80,45
Kota Denpasar	2013	2,07	2,72	0,3638	81,32
Kota Denpasar	2014	2,21	2,32	0,3809	81,65
Kota Denpasar	2015	2,39	3,54	0,3589	82,24
Kota Denpasar	2016	2,15	-	0,3307	82,58
Kota Denpasar	2017	2,27	2,63	0,3414	83,01
Kota Denpasar	2018	2,24	1,87	0,3422	83,30

Kota Denpasar	2019	2,10	2,29	0,3473	83,68
Kota Denpasar	2020	2,14	7,62	0,3301	83,93
Kota Denpasar	2021	2,96	7,02	0,3750	84,03
Kota Denpasar	2022	2,97	5,08	0,3680	84,37
Kota Denpasar	2023	2,68	2,85	0,3420	84,73

Keterangan:

Y = Data Persentase Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali

X1 = Data Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali

X2 = Data Gini Rasio Provinsi Bali

X3 = Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/



Nomor : B.1259/Un.22/7.a/PP.00.9/11/2024
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

1 November 2024

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Ekonomi Islam FEBI UIN KHAS Jember
 Jl. Mataram No. 01 Mangli Kaliwates Jember

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa berikut :

Nama : Dwi Oktavia
 NIM : 214105020008
 Semester : 7 (Tujuh)
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul : Determinasi Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2010-2023

Mohon diizinkan untuk mengadakan Penelitian/Riset pada tanggal 1-20 November 2024 dengan mengambil data sekunder yang bersumber dari:

1. <https://bali.bps.go.id/id> (BPS Provinsi Bali)
2. <https://banten.bps.go.id/id> (BPS Provinsi Banten)
3. <https://jakarta.bps.go.id/id> (BPS DKI Jakarta)
4. <https://jabar.bps.go.id/id> (BPS Provinsi Jawa Barat)
5. <https://jateng.bps.go.id/id> (BPS Provinsi Jawa Tengah)
6. <https://yogyakarta.bps.go.id/id> (BPS DIY)
7. <https://jatim.bps.go.id/id> (BPS Provinsi Jawa Timur)
8. <https://ntt.bps.go.id/id> (BPS Provinsi NTT)
9. <https://ntb.bps.go.id/id> (BPS Provinsi NTB)

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Rahayu
 Nurul Widyawati Islami Rahayu



Lampiran 7 : Surat Keterangan Selesai Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

SURAT KETERANGAN

Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dwi Oktavia
 NIM : 214105020008
 Semester : VII (Tujuh)
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul : Determinasi Kemiskinan Di Provinsi Bali Tahun 2010-2023

telah melaksanakan penelitian untuk memenuhi tugas skripsi, terhitung tanggal 1 November – 22 November 2024 dengan mengambil data dari :

1. <https://bali.bps.go.id/id> (BPS Provinsi Bali)
2. <https://banten.bps.go.id/id> (BPS Provinsi Banten)
3. <https://jakarta.bps.go.id/id> (BPS DKI Jakarta)
4. <https://jabar.bps.go.id/id> (BPS Provinsi Jawa Barat)
5. <https://jateng.bps.go.id/id> (BPS Provinsi Jawa Tengah)
6. <https://yogyakarta.bps.go.id/id> (BPS DIY)
7. <https://jatim.bps.go.id/id> (BPS Provinsi Jawa Timur)
8. <https://ntt.bps.go.id/id> (BPS Provinsi NTT)
9. <https://ntb.bps.go.id/id> (BPS Provinsi NTB)

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 21 November 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

A.n. Dekan
 Ketua Jurusan Ekonomi Islam

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I

J E M B E R

Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Oktavia
 NIM : 214105020008
 Semester : VII

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 21 November 2024
 Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



Lampiran 9 : Surat Lulus Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Oktavia
 NIM : 214105020008
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul : Determinasi Kemiskinan Di Provinsi Bali Tahun 2010-2023

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan Aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada Aplikasi DrillBit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 November 2024
 Operator Aplikasi DrillBit
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



Lampiran 10 : Biodata Penulis

BIODATA



Nama : Dwi Oktavia
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 05 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dsn. Mojoroto Rt 01/ Rw 01 Ds.
 Tegalsari Kec. Tegalsari Kab. Banyuwangi
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Riwayat Pendidikan :

1. Tk PGRI 1 Setembel (2008 - 2009)
2. SDN 8 Gambiran (2009 - 2015)
3. MTS Negeri 8 Banyuwangi (2015 - 2018)
4. SMA Negeri 1 Cluring (2018 - 2021)
5. UIN KHAS JEMBER (2021 - Selesai)